

**PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA PADA
PEMILUKADA ACEH TAHUN 2017
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**JONI SYAHPUTRA
NIM. 150801072
Jurusan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1441 H/2019 M**

**PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA PADA PEMILUKADA
ACEH TAHUN 2017
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Politik

Oleh:

JONI SYAHPUTRA

NIM. 150801072

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Politik**

Disetujui Oleh:

AR - RANIRY

Pebimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum
Nip. 19730723 200003 2 002



Eka Januar, M.Soc., Sc.
Nip. 19840101 201503 1 003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan oleh :
JONI SYAHPUTRA
NIM : 150801072

Pada Hari / Tanggal

Kamis: 6 Desember 2019
9 Rabiul Akhir 1441 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP. 19730723 200003 2 002

Sekretaris

Eka Januar, M. Soc., Sc
NIP. 19840101 201503 1 003

Penguji I

Muazzinah, B. Sc., MPA
NIDN. 2025118401

Penguji II

Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 19661023 199402 1 001

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP. 19730723 200003 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Joni Syahputra

NIM : 150801072

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Aceh Tahun 2017; Studi di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”*** adalah benar karya saya asli saya, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019



Joni Syahputra
NIM. 150801072

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai insan terpilih menyampaikan risalah Islamiyah yang bermuatan aqidah dan syari'at membentuk akhlaqul karimah sebagai modal dunia akhirat. "***Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Aceh Tahun 2017; Studi di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh***", merupakan judul skripsi yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Terimakasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Abdul Mutu dan ibunda tersayang Inang, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tulus ikhlas tiada henti-hentinya untuk penulis sehingga bisa menuntut ilmu sampai selesai.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muhammad AR, M.Ed. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Rizkika Lhena Darwin, S. IP., MA, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

5. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Terima kasih kepada seluruh teman seangkatan mahasiswa Ilmu Politik yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sumbangan gagasan, kritikan, saran dan masukan yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 13 Desember 2019
Penulis,

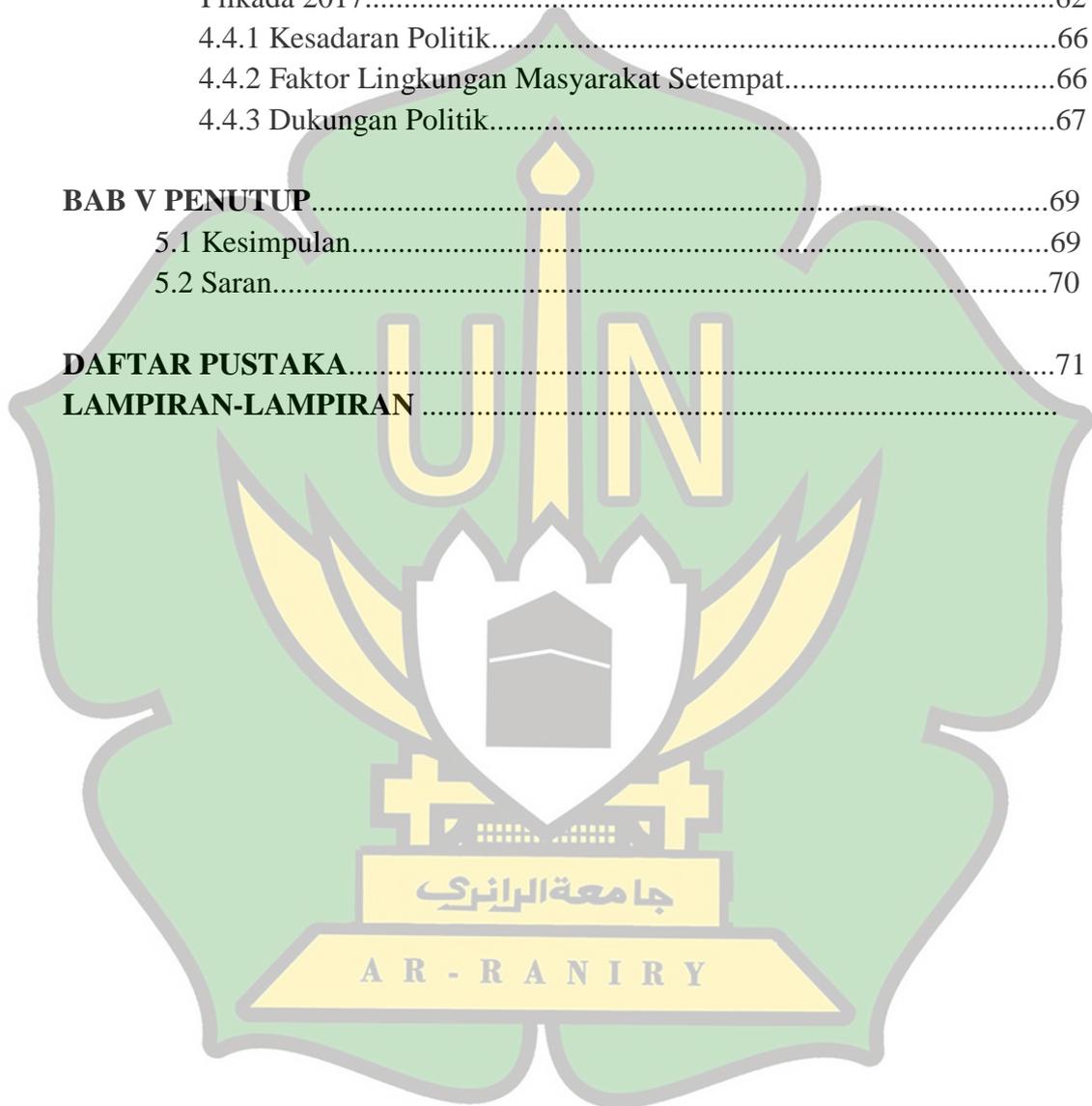
AR - RANIRY

Joni Syahputra

DAFTAR ISI

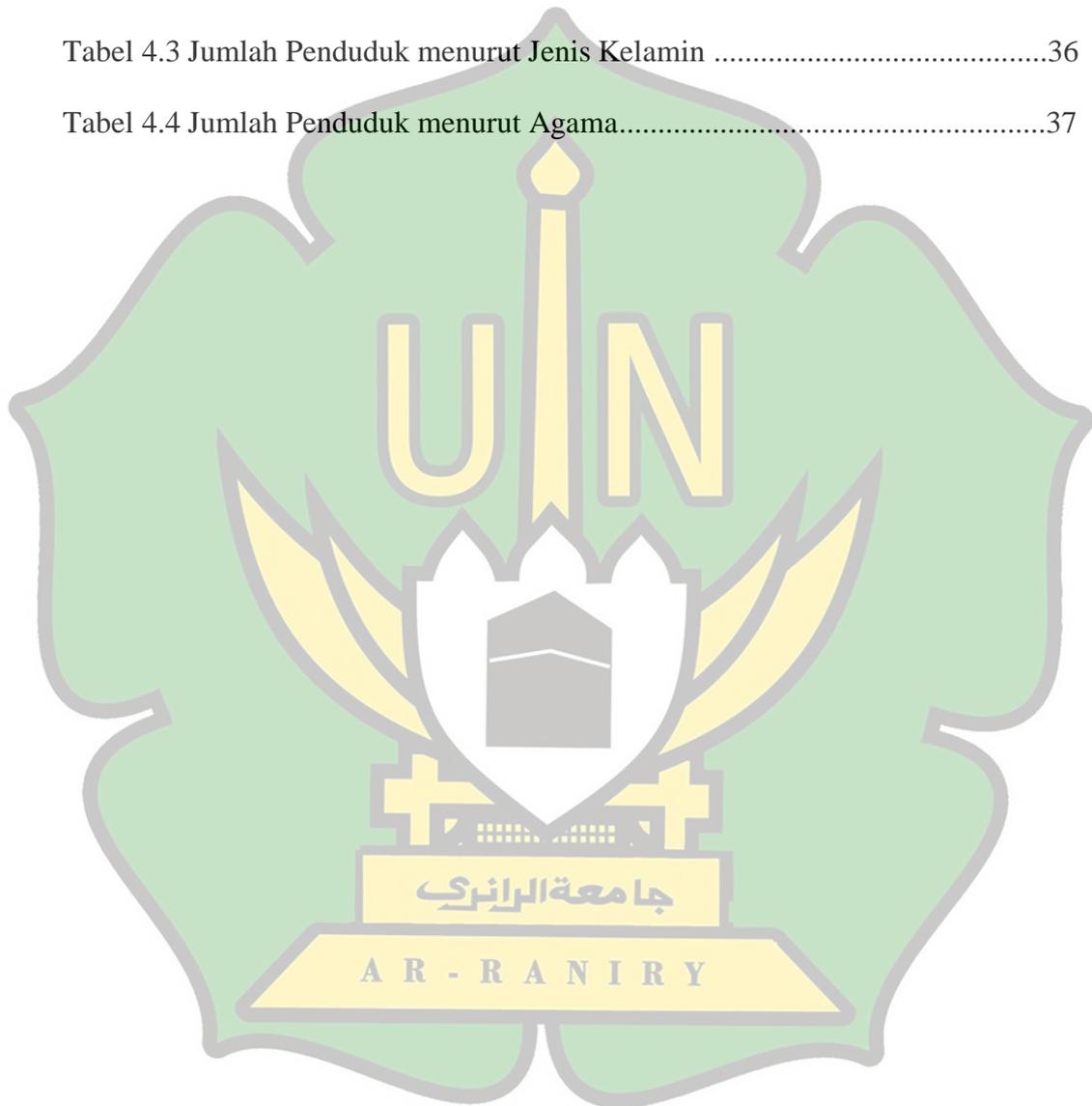
JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PENRYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Definisi Politik Identitas.....	16
2.3 Integrasi Politik.....	21
2.4 Partisipasi Politik.....	24
2.5 Hubungan Integrasi, Politik Identitas dan Partisipasi Politik.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Informan Penelitian.....	30
3.4 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
4.2 Sejarah Etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.....	39
4.3 Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Kuta Alam pada Pilkada 2017.....	43
4.3.1 Tim Sukses Pasangan Calon.....	50
4.3.2 Tidak Terlibat dalam Pengurus Partai Politik.....	52

4.3.3 Saksi dan KPPS pada Perhitungan Suara di TPS.....	54
4.3.4 Ikut Serta dalam Kegiatan Kampanye.....	56
4.3.5 Pemberian Suara sebagai Hak Pilih Warga Negara.....	59
4.4 Pengaruh Kepentingan Politik Identitas Masyarakat Tionghoa terhadap Kemenangan Aminullah Usman-Zainal Arifin pada Pilkada 2017.....	62
4.4.1 Kesadaran Politik.....	66
4.4.2 Faktor Lingkungan Masyarakat Setempat.....	66
4.4.3 Dukungan Politik.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-batas Gampong dalam Kecamatan Kuta Alam Tahun 2018.....	34
Tabel 4.2 Luas Gampong dan Jumlah KK.....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk menurut Agama.....	37



DAFTAR SINGKATAN

HAKKA	: Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Hakka merupakan kelompok Han terakhir yang bermigrasi ke selatan dari Tiongkok Utara secara bertahap semenjak abad ke-4 M dikarenakan bencana alam, perang dan konflik).....	3
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	4
KPPA	: Komisi Perdamaian dan Peralihan Aceh.....	4
DPT	: Daftar Pemilih Tetap.....	4
KIP	: Komisi Independen Pemilihan.....	4
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	11
PKL	: Pedagang Kaki Lima.....	20
PKN	: Pendidikan Kewarganegaraan.....	43
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah.....	43
TPS	: Tempat Pemungutan Suara.....	43
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	44
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.....	44
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....	50

AR - RANIRY

ABSTRAK

Keberadaan etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Kuta Alam, sudah menjadi perhatian bagi politisi atau pasangan calon saat berlaga baik dalam pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), maupun dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Awalnya keberadaan etnis ini kurang mendapat perhatian. Kini, pasca reformasi, etnis Tionghoa sudah memiliki akses dalam politik. Misalnya, mereka dibenarkan terlibat dan berpartisipasi langsung dalam politik seperti hak pilih dan hak terlibat dalam perpolitikan Pemilihan Walikota Kota Banda Aceh. Khususnya di Aceh keterlibatan mereka memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilangkahi, karena Aceh memiliki kekhususan yang diakui oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilukada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh dan kepentingan politik identitas masyarakat Tionghoa pada Pemilukada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu, seorang tokoh komunitas Tionghoa, empat orang warga etnis Tionghoa, dua orang tim pemenang politik pasangan calon, Kepala Desa Peunayong, Kepala Desa Gampong Laksana, seorang pengusaha Tionghoa dan seorang akademisi/pengamat. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Pemilukada tahun 2017 lalu yaitu mulai dari pemberian suara, saksi pada salah satu pasangan calon, bahkan ada yang menjadi tim sukses pada salah satu pasangan calon Walikota Banda Aceh dan partisipasi politik etnis Tionghoa yang dihitung tingkat Kecamatan Kuta Alam pertisipasinya mencapai 57,32%. Selain itu, politik identitas masyarakat Tionghoa didorong oleh kesadaran politik dan lingkungan masyarakat setempat, namun ada juga yang tidak terpengaruh dikarenakan kesibukan sehari-hari dan sebagian besar kesadaran politik semakin meningkat dari waktu ke waktu.

جامعة البرانري

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Etnis Tionghoa dan Pemilukada 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku yang mendiami berbagai pulau. Sebagai negara yang multi kultural atau heterogen baik itu suku, ras, etnis, budaya dan sebagainya, namun diikat juga dengan filosofi ber-Bhinneka Tunggal Ika, sehingga Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara multikultural dengan cakupan berbagai macam budaya dari bermacam-macam etnis masyarakat yang mendudukinya.

Indonesia juga dikenal dengan negara yang berbudaya majemuk, sehingga tidak diherankan lagi, apabila Indonesia berpenduduk yang banyak dan terdiri dari berbagai wilayah negara yang tersebar dipenjuru negeri ini. Etnis pribumi adalah masyarakat asli penduduk Indonesia, sedangkan etnis pendatang yaitu masyarakat yang datang dan menetap di wilayah Indonesia, seperti etnis Tionghoa, Arab dan India.¹ Pendatang yang dominan terlihat dalam struktur masyarakat Indonesia adalah etnis Tionghoa.

Orang Tionghoa atau Tionghwa/Huaren adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata “Tionghoa” sering digunakan untuk menggantikan kata “Cina” yang memiliki konotasi negatif. Sebenarnya orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia berasal dari Propinsi Fujian dan Guangdong dibagian Cina Selatan yang terdiri dari suku bangsa seperti Hokkian dan Kanton pada masa Dinasti Tang di daerah Selatan Cina yang merupakan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 304

tempat yang sangat strategis untuk perdagangan, sehingga timbullah kolega yang berdagang yang melakukan pelayaran, salah satunya di Indonesia.²

Kini, jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa naik sekitar 1,45% sampai 2,04% setiap tahun, sehingga Indonesia disebut dengan negara pluralisme, di mana terdapat kemajemukan atau masyarakat yang heterogen di setiap wilayahnya. Maka itu, tidak dapat dipungkiri lagi kalau mereka juga ikut berpartisipasi dan andil dalam setiap pemilu yang dilaksanakan di Indonesia.³

Kehadiran partisipasi dalam bidang politik, etnis Tionghoa menjadi sebuah mesin yang berpengaruh sebagai kekuatan politik bagi elit politik. Hal ini dilihat dari pemilu ke pemilu, proses menuju kekuasaan Indonesia, para elit politik tidak lupa melirik potensi suara terpendam yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Apalagi jumlahnya berpengaruh terhadap perolehan suara setiap pemilu.⁴

Keterlibatan politik etnis dalam berbagai aspek politik negeri ini adalah sebuah hasrat untuk memulihkan identitas etnis dan memperjuangkan kepentingan etnis setelah apa yang terjadi dalam beberapa dekade politik bangsa Indonesia pada masa dulu.⁵ Apabila dipahami bahwa kehadiran politik identitas dalam setiap pemilu di Indonesia adalah antitesis dari kekuatan politik yang sentralistis dan hegemoni selama orde baru berkuasa. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok.

² Victor Purcell, *The Chinese In Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981), hlm. 465. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh di Cina.

³ Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 5

⁴ Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 160

⁵ Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran Pendidikan Isam Ahmad Syafii Ma'arif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 77

Era reformasi pada masa Presiden B.J Habibie menjadi arti kemerdekaan bagi etnis Tionghoa, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Memasuki kepemimpinan K.H Abdurahman Wahid, etnis Tionghoa telah secara bebas untuk mengadakan kegiatan kebudayaan mereka seperti Imlek, tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.⁶ Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai pada Juni 2005 sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi”, karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara.

Sedangkan dalam sudut pandang sosial masyarakat Tionghoa, politik identitas dapat dilihat dengan gerakan kebangkitan orang Tionghoa dalam bidang politik maupun budaya. Munculnya etnis Tionghoa dalam persoalan politik menjadi desentralisasi menunjukkan peningkatan politik lokal sehingga etnis Tionghoa yang notabeneanya berada hampir di seluruh wilayah Indonesia juga ikut andil dalam peran politik lokal di Indonesia.⁷

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa partisipasi dan peran aktif warga Tionghoa dalam dinamika sosial, politik dan kultural meningkat signifikan pasca reformasi. Hal serupa juga mengalami perkembangan di Aceh, dimana pasca konflik dan tsunami 2004 lalu, saat Aceh dibenarkan calon gubernur melalui jalur independen serta dibenarkan adanya partai lokal, daya tarik terhadap etnis Tionghoa semakin besar, sebab jumlah etnis Tionghoa saat itu sudah banyak

⁶ Agus Suharyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, [Jurnal] *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 156

⁷ Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewarganegaraan, Arah Baru Politik, Keragaman di Indonesia*, (Bandung – Yogyakarta: Mizan Pustaka, 2011), hlm. 18

jumlahnya dan menjadi salah satu sumber suara. Adanya partai lokal di masa itu semakin banyak peluang etnis Tiongho misalnya di Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan hak pilih dalam Pilkada.

Wilayah Kota Banda Aceh adalah terbanyak jumlah etnis Tionghoa. Dalam Pemilihan Walikota Banda Aceh, terutama tahun 2012 lalu etnis Tionghoa menjadi perhatian bagi kandidat pasangan calon Walikota. Apalagi pada Pemilihan tahun 2017 lalu, para kandidat calon Walikota justru bersaing dan memiliki cara tersendiri untuk mencari perhatian dari etnis Tionghoa.

Keberadaan etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Banda Aceh sudah mulai terlibat langsung dalam arus politik, misalnya melalui kelompok-kelompok persatuan masyarakat Tionghoa seperti HAKKA Aceh, yaitu sebuah kelompok Tionghoa Han terbesar di Indonesia, melalui beberapa organisasi ini partisipasi etnis Tionghoa dalam Pemilihan di Kota Banda Aceh sudah terlihat respon dan kepeduliannya dalam mensukseskan pemilu. Partisipasi tergambar dalam beberapa bentuk, ada bentuk partisipasi langsung, bentuk partisipasi tidak langsung ada pula bentuk partisipasi melalui dukungan yang tidak langsung, bahkan sebagian etnis Tionghoa ada ikatan kontrak politik dengan para calon-calon kepala daerah. Misalnya, A Khi sebagai ketua organisasi HAKKA Aceh menyampaikan beberapa masukannya kepada Aburazak sebagai wakil ketua KPPA untuk diperjuangkan melalui Partai Aceh pada pemilu Legislatif 2014 lalu.⁸

Solidaritas persatuan identitas etnis Tionghoa sangat kental di Banda Aceh, di mana antar sesama etnis Tionghoa mereka lebih suka memakai bahasa *khek*

⁸ Atjehpost. Com. *Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2014*, di akses pada tanggal 21 Agustus, 2018

sebagai ciri etnis cina di Banda Aceh dari pada bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari.⁹ Namun hal itu, tidak menjadi sebuah deskriminasi etnis pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini bisa dilihat dari keseharian masyarakat Tionghoa yang mampu beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat kota Banda Aceh, terutama yang tinggal di Kecamatan Kuta Alam.

Wilayah paling banyak jumlah etnis Tionghoa adalah di Peunayong. Bahkan gampong Peunayong ini sudah disebut sebagai daerah pecina (khusus etnis China) atau *China Town*. Peunayong ini merupakan daerah yang banyak berdomisili etnis Tionghoa. Khususnya di Kecamatan Kuta Alam terutama di gampong Peunayong, tingkat partisipasi politik warga etnis Tionghoa sebesar 11%. Namun pada Pemilukada berikutnya yaitu 2017 lalu, tingkat partisipasi etnis Tionghoa mengalami peningkatan, yaitu 47.8% dari jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rilis KIP Kota Banda Aceh.¹⁰

Melihat partisipasi politik warga etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh, maka gampong Peunayong adalah lokasi yang paling tepat untuk dijadikan sebagai objek. Karena di gampong Peunayong didominasi oleh warga etnis Tionghoa, sehingga untuk ukuran persentase sampel sangat tepat untuk mejadi ukuran. Jumlah penduduk muslim di Peunayong adalah 1.496 jiwa atau (49,32%), sementara penduduk yang beragama non muslim sebanyak 1.535 jiwa atau (50,60%),¹¹ sebanyak 2.041 yang dinyatakan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KIP

⁹ Usman Rani, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm. 200

¹⁰ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, dikutip melalui situs https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh, diakses pada tanggal 12 Februari 2019

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018*, (Banda Aceh: BPS, 2018), hlm. 12

Banda Aceh dan sebanyak 975 jiwa yang menggunakan hak pilihnya atau sebanyak 47,83% tingkat partisipasi politiknya.¹²

Selain itu, keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilukada juga dapat ditemui secara idividu dalam memilih kepala daerah pada pilkada Aceh 2017 dan menjadi kekuatan politik penyumbang suara bagi calon walikota Banda Aceh sehingga berpengaruh terhadap kemenangan calon tersebut, seperti yang diberitakan oleh media bahwa warga etnis Tionghoa yang tinggal di empat gampong di Kecamatan Kuta Alam memberikan 4.296 suara sah kepada H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh periode 2017 – 2022.¹³

Menurut data yang tertera pada website KPU bahwa pasangan H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin, memperoleh kemenangan suara sebanyak 877 di gampong Peunayong dibandingkan pasangan Hj. Illiza Salahuddin Djamal, SE-Farid Nyak Umar, ST, yang hanya memperoleh suara sebesar 88.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa begitu besar partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pemilukada di Kota Banda Aceh yang tersalurkan pada dua calon kandidat di atas.

Hal ini terjadi karena diskriminasi politik tidak lagi membatasi naluri politik mereka, jadi wajar jika banyak orang Tionghoa memilih terjun dalam dunia politik dan menjadi bagian dari mesin politik pasangan kandidat untuk mendapatkan suara dari etnis Tionghoa pada setiap pemilu dan pesta demokrasi yang berlangsung di

¹² Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

¹³ Ovi Amalia Sari, Zulfan, *Jurnal Aceh Terkini. Com*, 2017, Vol. 2 di akses tanggal 21 Agustus 2018 dapat dilihat pula dalam Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

¹⁴ Aceh Terkini. Com. *Pilkada 2017*, kpu. go.id, di akses tanggal 21 Agustus 2018

negara ini.¹⁵ Dalam konteks demokrasi lokal Banda Aceh seperti pemilihan kepala daerah pada pilkada 2017, perilaku pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan etnisitas, atau pemilih melihat calon yang dapat menampung aspirasi kepentingan etnis, kelompok marginal mereka.

Partisipasi politik yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok etnis Tionghoa bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau elit politik dalam pembuatan kebijakan yang nantinya dapat menguntungkan kepentingan etnis itu sendiri, di mana pengaruh identitas dalam politik terwujud karena kepentingan dari suatu kelompok etnik, agama, bahasa dan lain sebagainya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.¹⁶

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah di atas, sehingga peneliti mengangkat sebuah permasalahan yang berjudul: *“Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Aceh Tahun 2017; Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada penjelasan-penjelasan panjang di atas, berkenaan dengan partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilukada Aceh Tahun 2017; Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilukada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh?

¹⁵ Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 128

¹⁶ Imaduddin Nasution, *Demokrasi dan Politik*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 2013), hlm. 319

2. Bagaimana kepentingan politik identitas masyarakat Tionghoa pada Pemilu pada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu pada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan politik identitas masyarakat Tionghoa pada Pemilu pada 2017 di Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai politik identitas dan kepentingan politik etnis Tionghoa.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bukan hanya bagi peneliti tapi juga akademisi lainnya mengenai kajian politik identitas Tionghoa di Kuta Alam Kota Banda Aceh. Serta dapat menjadi referensi bagi prodi ilmu politik FISIP UIN AR-RANIRY.
3. Bagi peneliti lain dan masyarakat, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memahami politik identitas etnis Tionghoa dan dapat menambah wawasan bagi peneliti lain mengenai politik identitas etnis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang diawali dengan penelitian terdahulu kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang meliputi definis politik identitas, integrasi politik, partisipasi politik, hubungan integrasi, politik identitas dan partisipasi politik, kemudian keberadaan etnis Tionghoa di Banda Aceh.

Bab tiga merupakan uraian pembahasan tentang metode penelitian, yang meliputi lokasi penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan bab hasil penelitian tentang partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemiluakada Aceh Tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang meliputi hasil penelitian, sejarah etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, partisipasi politik etnis Tionghoa di Kuta Alam pada Pilkada yang memiliki pembahasan tentang tim sukses pasangan calon, tidak terlibat dalam pengurus partai politik, saksi dan KPPS pada perhitungan suara di TPS, ikut serta dalam kegiatan kampanye dan pemberian suara sebagai hak pilih warga negara, kemudian dilanjutkan dengan poin pengaruh kepentingan politik identitas masyarakat Tionghoa terhadap kemenangan Aminullah Usman-Zainal

Arifin pada Pilkada 2017, yang terdiri dari sub bahasan kesadaran politik, faktor lingkungan, dukungan politik, kesadaran politik.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Ovi Amalia Sari, dkk., (2017) berjudul "*Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012*" Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data penelitian ini bersumber dari KIP Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam Gampong Peunayong, partai politik, dan etnis Tionghoa dalam konteks partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006-2012. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian bahwa, bentuk partisipasi etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemilukada tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk konvensional. Pada Pilkada tahun 2006 bentuk partisipasi politik yang dilakukan etnis Tionghoa hanya satu bentuk partisipasi politik yaitu pemberian suara (*voting*). Sedangkan pada Pemilukada tahun 2012 bentuk partisipasi politik etnis Tionghoa meningkat menjadi lima bentuk partisipasi politik yang terdiri dari pemberian suara (*voting*), penetapan daftar pemilih, membicarakan masalah politik, mengikuti kampanye, menjadi saksi pada penghitungan suara.

Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2012 yaitu faktor kesadaran politik dan rasa ingin tahu,

sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan anggapan belum ada kemampuan.

2. Risfandi (2017), meneliti tentang *“Tingkat Efektivitas Sosialisasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode 2017-2022; Studi Penelitian terhadap Etnis Tionghoa di Peunayong Kota Banda Aceh”*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh terhadap warga etnis Tionghoa masih tidak efektif dan kurang maksimal dengan melihat ada beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut. KIP Kota Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga etnis Tionghoa. Bentuk sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada warga etnis Tionghoa yaitu pertama, KIP Kota Banda Aceh seharusnya membentuk tim Relawan Demokrasi yang dapat memberikan sosialisasi khusus kepada warga etnis Tionghoa. Kedua, KIP Kota Banda Aceh harus mengagendakan jadwal sosialisasi khusus sejak pra pemilihan kepala daerah. Ketiga, KIP Kota Banda Aceh seharusnya menyasar atau mendatangi langsung kawasan berbasis etnis Tionghoa dan melakukan sosialisasi dalam bentuk pawai.

3. Maghfira Faraidiany (2015), berjudul *“Politik Identitas Etnis di Indonesia; Suatu Studi terhadap Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan”*. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan tentang politik identitas masyarakat etnis Tionghoa di kota Medan.

Hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa politik etnis lebih efektif digunakan untuk menarik perhatian masyarakat jauh sebelum pelaksanaan pemilu, karena politik etnis lebih bersifat kasat mata dari pada politik uang. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu pelanggaran kampanye. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian baik berupa uang, sembako (minyak, beras, dan gula) yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kinerja anggota DPRD yang berasal dari etnis Tionghoa di lembaga legislatif tersebut memiliki hubungan erat terhadap tingkat kesejahteraan etnis yang mereka wakili, di mana masyarakat lebih dituntun untuk menentukan pilihan karena ikatan identitas etnis tertentu dengan salah satu calon. Masyarakat diberi pandangan bahwa kepentingan masyarakat hanya akan dapat dipenuhi apabila masyarakat tersebut memilih pasangan yang berasal dari etnis yang sama dengan pemilih tersebut.

¹ Peraturan Pemilu, *Artikel Bertopik Politik ini adalah Sebuah Rintisan*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019

4. Ety Gustin Merdeka Waty (2016), dengan judul skripssinya “*Orientasi Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar*”.² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskripsi-analisis dimana tipe penelitian ini secara jelas mencoba menggambarkan secara jelas bagaimana orientasi politik etnik dalam dinamika politik pemilihan di kota makassar, dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara langsung dengan sasaran penelitian untuk memahami secara mendalam terkait perilaku etnis, dan kondisi lapangan.

Hasil penelitian di atas menunjukkan orientasi politik dari etnis Tionghoa terbentuk karena adanya kepentingan etnis Tionghoa dalam menjalankan kegiatan interaksi sosial. Masyarakat etnis Tionghoa sendiri ikut berpartisipasi dalam tiap proses politik yang masing-masing momentumnya berbeda pula bahwa adanya hubungan timbal balik antara politik dengan etnisnya yang kemudian kesadaran tersebut diarahkan dalam area politik dalam bentuk kesadaran individu maupun kelompok (etnis Tionghoa).

Sebaliknya masyarakat pemilih yang terbagi berdasarkan kelompok etnis menilai kandidat tersebut dan memberikan dukungannya. Generasi muda masyarakat Tionghoa yang berupaya bangkit hidup bersejajar dengan warga pribumi lainnya baik dalam ekonomi maupun politik, dengan mencoba mengalahkan traumatik masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa berusaha sejalan dengan keinginan masyarakat pribumi, untuk memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan hati nurani.

² Ety Gustin Merdeka Waty, seorang mahasiswa program studi ilmu politik pemerintahan, “*Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar*”. (Fakultas ISIP Univesitas Hasanuddin Makassar, 2016)

Dari beberapa penelitian yang telah ditampilkan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Ovi Amalia Sari, dari konsep penelitian memiliki pendekatan yang sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif namun tidak dengan metode sejarah akan tetapi dengan metode deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini. Subjek penelitian seperti KIP Banda Aceh tidak digunakan dalam penelitian ini, sebab yang diperlukan adalah data pemilih saja dan data itu tersedia dalam situs online yang disebarluaskan secara resmi. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah dengan memanfaatkan masyarakat wilayah lokasi penelitian. Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian masing-masing berbeda dengan hal ini dapat dilihat dari rumusan masalah keduanya yang jauh berbeda.
2. Penelitian Risfandi, dari aspek metode memiliki kesamaan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berkaitan dengan aspek data, penelitian ini membagi data dalam dua bagian yang data primer dan data sekunder. Kemudian, penelitian Risfandi mencoba melihat pengaruh dan partisipasi politik, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, tidak berkaitan dengan pengaruh serta dari aspek subjek juga berbeda.
3. Penelitian Maghfira Faraidiany, menggunakan pendekatan kualitatif seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun penelitian Maghfira Faraidiany memanfaatkan metode eksplorasi untuk mengenal politik identitas masyarakat etnis Tionghoa di kota Medan. Dari sisi rumusan masalah juga berbeda jauh dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek penelitian juga berbeda dan tidak memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama meneliti kepentingan dari

proses politik identitas etnis Tionghoa, yang beda skripsinya beliau tidak menjabarkan fenomena politik identitas etnis Tionghoa secara tersurat walaupun secara tersirat menggambarkan dalam masalah fenomena lapangan ataupun hasil penelitian, dan lebih fokus kepada orientasi serta Kecenderungan Pemilih Etnis Tionghoa dalam menentukan Pilihan Politik Pada Setiap Kontestasi Politik, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada perkembangan politik identitas etnis Tionghoa.

4. Ety Gustin Merdeka Waty, menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskripsi-analisis, dan berbeda pula dengan metode yang diajukan oleh penulis. Dari uraian bacaan, penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang di akan dilakukan adalah objek kajiannya adalah etnis Tionghoa yang tinggal di pusat kota ataupun sebuah tempat pecinan di ibu kota provinsi.
5. Adapun yang menjadi hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa politik etnis lebih efektif digunakan untuk menarik perhatian masyarakat jauh sebelum pelaksanaan pemilu, karena politik etnis lebih bersifat kasat mata dari pada politik uang. Dari sisi variabel yang akan diteliti juga tidak memiliki kesamaan dengan aspek-aspek tersebut.³

2.2. Definisi Politik Identitas

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik,

³ Peraturan Pemilu, *Artikel Bertopik Politik ini adalah Sebuah Rintisan*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019

baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkret, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kumpulan-kumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan.⁴

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari, apalagi di Indonesia. Misalnya, Agnes Heller *dalam* Muhtar Haboddin mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.⁵ Sedangkan Donald L Morowitz *dalam* Muhtar Haboddin mendefinisikan, bahwa politik identitas daerah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.⁶

Sementara itu, menurut Agnes Heller yang dikutip oleh Ubed Abdillah (2002), politik identitas adalah sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*different*) sebagai suatu kategori politik utama.⁷

⁴ Lukmantoro, Triyono. *Kematian Politik Ruang*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 2

⁵ Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Indentitas di Ranah Lokal*, [Jurnal] *Studi Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang, Volume 1, Nomor 1 Februari 2012*, hlm. 112

⁶ *Ibid.*, hlm. 112

⁷ Agnes Heller, dikutip Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis*, (Magelang : Indonesia Tera, 2002), hlm. 22

Setelah kegagalan narasi besar, ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*fair play*), meskipun kemudian ancaman politik muncul. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang melekat pada masyarakat seperti bangsa Indonesia ini, namun terlepas daripada itu perbedaan tetap menjadi pemersatu identitas-identitas yang begitu beragam sehingga tidak ada masyarakat tanpa pluralitas, tidak terkecuali dalam ranah politik etnis dengan kelompok mayoritas dan minoritas.⁸

Dalam literatur ilmu politik ada hal penting yang harus di bedakan dalam memaknai politik identitas dengan identitas politik, politik identitas (*politics of identity*) adalah mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik, sedangkan identitas politik (*political identity*) adalah merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. politik identitas sebagai sumber daya dan saran politik terdapat dalam pertarungan mencapai kekuasaan politik sangat mungkin dan ditemukan dalam praktek praktek politik sehari-hari.

Pengorganisasian identitas dan gerakan berdasarkan perbedaan etnis adalah sebuah dinamika pertumbuhan dari politik identitas. Klaus Von Bayme (1996) dalam membagi gerakan politik identitas ke dalam tiga katagori berdasarkan perkembangannya, pramodern, modern dan postmodern. Pada tahap pertama pramodern yaitu memunculkan gerakan sosial politik secara menyeluruh yang diakibatkan oleh perpecahan fundamental, kelompok kesukuan, dan

⁸Abdillah, Ubed S, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*, (Magelang : Indonesiatera, 2002), hlm. 16

kebangsaan.⁹ Hal ini mobilisasinya dipraksai oleh para pemimpin, tujuan gerakan ini adalah untuk perampasan dan perebutan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa yang baru.

Dalam Ubed Abdullah, pemahaman identitas politik ini sangat berimplikasi pada kecenderungan masyarakat, untuk:

1. Mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya.
2. Demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan.
3. Kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya.¹⁰

Dijelaskan lagi oleh Ubed Abdillah, selain itu ada lagi karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya.¹¹ Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar.

Politik identitas terbagi dalam tiga model, adapun tiga model tersebut yaitu sebagai berikut:

⁹*Ibid.* hlm.17

¹⁰ Ubed Abdillah, (*Politik Identitas Etnis*), Magelang: Indonesia Tera, 2002), hlm. 119

¹¹ *Ibid.*, hlm. 120

1. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas yaitu identitas yang dibangun oleh intitusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Intitusi ini dapat menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas pada seseorang atau kelompok tertentu
2. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor tertentu, yang tertekan oleh suatu keadaan dari kebanyakan komunitas sosial lain, resistensi inilah yang sering memunculkan politik identitas.
3. *Project identity* atau proyek identitas, model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi baru dalam suatu kelompok masyarakat.¹²

Dari ke tiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik identitas sering terbentuk akibat seseorang atau kelompok tertentu yang berperan di dalamnya yang berusaha menciptakan kelompok-kelompok tertentu dalam kebersamaan dengan politik yang berbeda. Politik identitas etnis sendiri adalah proses yang lahir dari kegagalan modernitas untuk memenuhi janjinya, sehingga dewasa ini perkembangan politik identitas etnis lebih banyak menampilkan diri dalam wacana kebudayaan yaitu, postmodern. Persoalan politik identitas etnis yang terjadi dalam sebuah negara yang demokrasi dan multi etnis erat kaitanya dengan persoalan integrasi, yaitu bagaimana sebuah golongan berinteraksi dengan golongan lainnya, serta saling toleransi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

¹² Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 26

2.3 Integrasi Politik

Dalam konsepnya, integrasi politik menunjuk pada sebuah “proses kepada” atau sebuah “produk akhir” penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara unit-unit nasional yang terpisah. Integrasi politik sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah “community”.¹³

Dalam masyarakat, integrasi politik terjadi ketika kelompok-kelompok etnis berusaha dan berinteraksi dengan menjaga dan menyatukan diri dalam suatu kelompok yang mengatasnamakan sebagai suatu bangsa atau negara. Di mana dalam suatu integrasi, kelompok etnis berusaha untuk di integrasikan pada persamaan, atas nama bangsa atau isme-isme kenegaraan seperti persatuan atau keutuhan bangsa.¹⁴

Integrasi dalam dunia politik erat kaitannya dengan keragaman suku. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain dan menjadi ciri khas dan simbol tersendiri, yang sekarang dikenal sebagai adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidak-tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya serta bahasa daerah Indonesia. Di mana banyak masyarakat pendatang yang menetap di Indonesia, seperti etnis Tionghoa, Arab dan India. Sehingga persoalan

¹³ Ignas Kleden dalam makalah berjudul “Identitas dan Integrasi” dalam Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi, 19-22 Oktober 2003.

¹⁴ *Ibid...*hlm.18

integrasi adalah persoalan penting di dalam upaya persatuan keanekaragaman identitas tersebut tanpa menghilangkan identitas aslinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi politik adalah upaya menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah yang disusun dan dilembagakan atas dasar sistem nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Integrasi politik suatu bangsa dalam hal ini adalah penyatuan masyarakat dalam sistem politik. Integrasi politik terjadi akibat berbagai budaya, ras dan suku yang terbentuk dan menyatu dalam satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi yang secara bersama-sama hidup dengan kehidupan budaya dan ekonomi dalam satu wilayah.

Integrasi politik ini terbentuk ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan.¹⁵ Di sisi lain, dijelaskan oleh Agus Maladi, integrasi yang lebih luas hanya mungkin terbentuk apabila sekelompok orang menerobos identitasnya dan mengambil jarak dari segala yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya atau watak kelompoknya.¹⁶ Dengan demikian ia meninggalkan identitasnya, yang kemudian membuka kemungkinan untuk pembentukan integrasi politik yang lebih luas.

Integrasi politik ini terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Misalnya, kelompok pedangang kaki lima (PKL) membentuk jaringan mereka ketika menghadapi Perda yang dikeluarkan Pemda atau ketika

¹⁵ Ignas Kleden dalam makalah berjudul "Identitas dan Integrasi" dalam Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi, 19-22 Oktober 2003.

¹⁶ Agus Maladi Irianto, *Integrasi Nasional sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indoensia [Jurnal] Budaya Nasional, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 27*

mereka harus menghadapi operasi Satpol PP.¹⁷ Maka itu, terlepas dari kepentingan politik apapun atau kelompok, proses integrasi politik harus mampu menjembatani celah perbedaan yang mungkin agar berkembang suatu proses politik yang terpadu dan melahirkan partisipasi politik masyarakat secara terarah. Integrasi politik sejauh ini belum terjadi secara utuh terutama apa yang kita lihat pasca pilpres 2004 sampai hari ini, benih-benih konflik akibat masalah politik belum sepenuhnya tuntas teratasi. Partai politik (partai politik) pemenang pemilu juga rasa-rasanya hanya sibuk mengurus soal-soal koalisi politik di tingkat elit dan bagaimana kekuatan-kekuatan politik mereka terakomodasi dalam struktur kekuasaan.

Melihat dari sekian banyak faktor yang ada pada persoalan integrasi politik, paling tidak kita dapat mengasumsikan dua masalah agar proses integrasi ini berjalan sesuai prosedur penguatannya, yaitu 1) bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara dan 2) bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat. Masalah pertama tentu mengacu pada pengakuan akan hak-hak yang dimiliki negara dan rakyat harus mematuhi sehingga dibutuhkan sebuah proses komunikasi yang terukur antara pemerintah dan rakyat.¹⁸ Masalah kedua lebih ke arah pembinaan, di mana harus dibangun kesepakatan di antara sesama warga negara tentang tingkah laku politik yang diperlukan agar sistem politik dapat berjalan dengan baik.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28

¹⁸ Kompasiana, "Virus Teror dan Integrasi Politik", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/syahiralimuzer/59352e6bf47e61f25105f2fd/virus-teror-dan-integrasi-politik?page=all>, pada tanggal 12 September 2019, pukul 10:23 WIB

Kesepakatan yang dibangun tentunya harus didasarkan pada kesamaan politik bahwa setiap warga memiliki hak politik yang sama dengan lainnya.¹⁹

2.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kemudian dijelaskan pula bahwa kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti rapat umum, menjadi anggota partai atau anggota kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen dan sebagainya.²⁰ Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Herbert McClosky menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, serta dalam proses kebijakan umum. Norman H. Nie dan Sidney Verba mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah semua aktivitas yang sah oleh semua warga Negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemulihan pejabat pemerintahan dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mempunyai akar persamaan dalam tujuan partisipasi politik yang dilakukan secara individu, kelompok, baik yang legal, efektif atau tidak efektif, bahwa partisipasi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik dibedakan: (1) Partisipasi individual, dilakukan oleh orang per orang secara individual, (2) Partisipasi kolektif, dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa, dan (3) membedakan bentuk partisipasi politik menjadi aktif dan pasif.

Partisipasi aktif merupakan aktivitas warga untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kebijakan sebagai alternatif kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, mengemukakan kritik sebagai upaya perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak. Sedangkan partisipasi yang dikategorikan pasif, seperti kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan semata-mata keputusan pemerintah.²¹

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson pada tahun 1994, menjelaskan bahwa masyarakat biasanya menyampaikan aspirasi atau melakukan partisipasi politik kurang lebih sebagai berikut:²²

- a. Kegiatan Pemilihan mencakup memberikan suara dalam pemilu, sumbangan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan.
- b. Terlibat dalam kampanye

²¹ Rizky Hani S.P, dalam Jurnal Paradigma. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013, hlm. 3

²² Internet, *Aspirasi dan Partisipasi Politik Masyarakat*, di akses pada tanggal 25 Oktober

- c. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka.
- d. Membentuk dan bergabung dalam berbagai organisasi,
- e. Mencari koneksi (contacting), melakukan diskusi politik,
- f. Melakukan komunikasi pribadi dengan pimpinan politik atau pejabat pemerintahan,
- g. Demontrasi, mogok/boikot, pembangkangan sipil, partisipasi politik dengan cara tersebut disebut pula sebagai cara partisipasi non-konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu seperti etnis yang bergabung dan berusaha menciptakan persamaan tanpa adanya perbedaan di antara mereka.

2.5. Hubungan Integrasi, Politik Identitas dan Partisipasi Politik

Sebagaimana diketahui bahwasannya, hubungan integrasi, politik identitas dan partisipasi politik terbentuk dari identitas kesukuan, keagamaan, bahasa dan ciri fisik. Integrasi, politik identitas dan partisipasi politik menjadikan suatu keadaan yang mampu mengubah suatu keadaan perbedaan menjadi satu kesatuan wilayah, sehingga menjadi suatu kunci bagi terbentuknya politik identitas di suatu wilayah. Dengan melihat bahwa representasi politik minoritas umumnya didominasi oleh kelompok yang secara etnik dan agama memang berasal dari satu kelompok identitas tertentu. Dalam partisipasi politik, mereka tidak benar-benar memiliki identitas yang sama dengan kelompok lainnya, sehingga identitas suatu

kelompok masyarakat begitu mudah mempengaruhi pilihan masyarakat dalam setiap ritual demokrasi.

Pengaruh identitas dalam politik terwujud karena kepentingan dari suatu kelompok etnik, agama, bahasa dan lain sebagainya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Di mana seseorang atau sekelompok orang pelakunya dikenal berbeda dengan kelompok lainnya. Hal ini yang menyebabkan adanya integrasi yang mampu menciptakan persamaan tanpa adanya perbedaan. Selain itu, proses integrasi sebuah bangsa merupakan proses meleburnya setiap identitas kelompok masyarakat dalam bangsa tersebut, tanpa mengubah identitas kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menciptakan suatu integrasi inilah, pemerintah dan partai politik diharapkan mampu mendorong partisipasi politik demi terwujudnya representasi politik dari kalangan minoritas di setiap negara dan daerah-daerahnya. Dengan adanya partisipasi politik dan terwujudnya representasi politik minoritas, maka kita dapat melihat bagaimana integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisilinya, dapat terwujud tanpa harus menyingkirkan identitas asli kelompok minoritas tersebut. Dalam suatu identitas kelompok minoritas bagaimanapun juga sangat diperlukan, demi mewujudkan suatu persatuan dan kesetaraan dalam keberagaman *Unity and equality in diversity*.²³

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa integrasi, partisipasi politik, dan politik identitas, terbentuk karena adanya kepentingan etnis Tionghoa dalam

²³ Nasution, M. Imaduddin, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia, Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*, (Jakarta: Verbum, 2012), hlm. 27

menjalankan kegiatan interaksi sosial. Masyarakat etnis Tionghoa sendiri ikut berpartisipasi dalam tiap proses politik yang masing-masing momentumnya berbeda, bahwa adanya hubungan timbal balik antara politik dengan etnisnya yang kemudian kesadaran tersebut diarahkan dalam area politik dalam bentuk kesadaran individu maupun kelompok (etnis Tionghoa), sebaliknya masyarakat pemilih yang terbagi berdasarkan kelompok etnisakan menilai kandidat tersebut dan memberikan dukungannya.²⁴



²⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu tahapan terpenting. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah.¹ Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tadjoe Ridjal, tentang penelitian kualitatif yaitu menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang telah mendasar, menarik dan bermakna di lapangan dan penelitian kualitatif terkadang pula disebut penelitian pemahaman.³ Dalam hal ini, partisipasi politik etnis Tionghoa pada pemilu pada Aceh tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, diuraikan dalam bentuk narasi dengan menghadirkan temuan-temuan atau bukti baik yang diperoleh melalui wawancara maupun yang diperoleh melalui dokumentasi atau catatan-catatan di lapangan.

¹ Sayuthi Ali, M. *Pendekatan Teori dan Praktek Edisi I, Cetakan I*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2002), hlm. 23

² Burhan Bungin, *Metode dan Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 112

³ Ibid....hlm.39

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di daerah Gampong Laksana dan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang merupakan dua tempat yang banyak ditempati oleh penduduk etnis Tionghoa yang dikenal dengan sebutan pecinan (kawasan komunitas etnis Tionghoa di Banda Aceh).

3.3 Informan Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian juga tergantung pada informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dijadikan subjek untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang mengungkapkan bahwa informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminati informasi oleh pewawancara yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sehingga yang akan diwawancarai pada saat penelitian adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian yang dilakukan, dan mampu mempertanggungjawabkan segala jenis informasi yang sudah di berikan.⁴

Seorang informan harus memiliki kriteria yang ditentukan oleh peneliti dan di yakini mampu memberikan sejumlah data yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang tokoh pemimpin komunitas Tionghoa

⁴ Burhan Bungin, *Metode dan Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 208

2. Masyarakat Tionghoa yang bermukim di Peunayoeng Kecamatan Kuta Alam (4 orang)
3. Tim Pemenangan Politik pasangan calon (2 orang)
4. Kepala Desa Gampong Peunayong
5. Kepala Desa Gampong Laksana
6. Seorang di kalangan pengusaha Tionghoa

3.4 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan melalui wawancara langsung dengan informan dan pihak yang terkait serta observasi lapangan.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada. Data ini akan didapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan dari sumber yang berkaitan lainnya.

Dari kedua data di atas, akan peneliti rumuskan dan simpulkan menjadi sebuah hasil penelitian yang bersifat akurat, jelas dan kredibel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara terbuka melalui tatap muka secara mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi dari responden. Wawancara terbuka ini tidak tergantung pada pertanyaan, namun dapat disesuaikan menurut jawaban responden dan melalui jawaban responden itu pula akan melahirkan pertanyaan tambahan jika diperlukan. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara personal terhadap masing-masing informan dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.⁵ Adapun informan yang akan diwawancarai seperti yang telah disebutkan dahulu, yang meliputi: (1) tokoh pemimpin komunitas Tionghoa, (2) masyarakat Tionghoa yang bermukim di Kecamatan Kuta Alam 4 orang, (3) anggota masyarakat yang terlibat tim pemenang politik 2 orang, (4) Kepala Desa Gampong Peunayong, (5) Kepala Desa Gampong Laksana, (6) Pengusaha Tionghoa 1 orang, dan (7) akademisi/pengamat.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dengan arti sebagai kegiatan mengamati langsung interaksi (perilaku) etnis Tionghoa berkenaan dengan partisipasi mereka dalam pemilu pada Aceh tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Observasi penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana partisipasi etnis Tionghoa dalam pemilu pada Aceh tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang telah dilakukan beberapa tahun lalu.

⁵ Krisyantoro, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.63

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi nonpartisipatif, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁶ Peneliti dalam hal ini menggali informasi namun tidak terlibat dalam politik etnis Tionghoa. Informasi-informasi berkaitan dengan partisipasi etnis Tionghoa dalam pemilukada Aceh tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dapat diperoleh melalui telaahan arsip-arsip atau dokumentasi yang ada di lapangan, seperti jumlah pemilih etnis Tionghoa dan dokumentasi partisipasinya dalam pemilukada 2017 lalu.

3. Dokumen dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan. Sedangkan kepustakaan berguna sebagai penunjang penelitian untuk memperoleh data kepustakaan lebih lengkap dan mendapat referensi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari,

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), hlm. 197

pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera di perbaiki.⁷

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, serta melalui dokumentasi yang berupa gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi⁸.

Ada 4 tahapan yang harus dilakukan pada saat analisis data diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Pengumpulan data yaitu idealnya pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft.
2. Tahap reduksi, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi dari hasil FGD diubah menjadi bentuk tulisan sesuai formatnya masing-masing.
3. Display, yaitu mengisi kolom-kolom pada matriks kategorisasi.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi penelitian.

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 83-84

⁸ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 247

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2012), hlm. 164

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Kuta Alam adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yang menjadi lokasi penelitian penulis. Kecamatan Kuta Alam letaknya di 05,56802 Lintang Utara dan 095,33568 Bujur Timur, dengan luas 10,2045 Km² (1020,45 Ha) terdiri dari 11 gampong. Adapun batasan teritorial Kecamatan Kuta Alam adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Baiturahman
3. Sebelah Timur : Kecamatan Syiah Kuala
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Raja

Adapun jumlah gampong dan batasan di Kecamatan Kuta Alam adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Batas-batas Gampong dalam Kecamatan Kuta Alam Tahun 2018

No	Gampong	Batas
1	Peunayong	Utara : Gampong Mulia Timur : Gampong Laksana Selatan : Gampong Kuta Alam Barat : Kecamatan Kuta Raja
2	Laksana	Utara : Gampong Mulia Timur : Gampong Keuramat Selatan : Gampong Kuta Alam Barat : Kecamatan Peunayong

No	Gampong	Batas
3	Keuramat	Utara : Gampong Mulia Timur : Gampong Bandar Baru Selatan : Gampong Kuta Alam Barat : Kecamatan Laksana
4	Kuta Alam	Utara : Gampong Laksana, Gp. Keuramat Timur : Gampong Beurawe Selatan : Gampong Baiturahman Barat : Kecamatan Peunayong
5	Beurawe	Utara : Gampong Bandar Baru Timur : Gampong Bandar Baru Selatan : Gampong Lueng Bata Barat : Kecamatan Kuta Alam
6	Kota Baru	Utara : Gampong Syiah Kuala Timur : Gampong Syiah Kuala Selatan : Gampong Ulee Kareng Barat : Kecamatan Bandar Baru
7	Bandar Baru	Utara : Gampong Lambaro Skep Timur : Gampong Kec. Syiah Kuala-Gp. Kuta BARo Selatan : Gampong Beurawe Barat : Gampong Mulia – Gp. Keuramat
8	Mulia	Utara : Gampong Lampulo - Gampong Lambaro Skep Timur : Gampong Bandar Baru Selatan : Gampong Peunayong, Gampong Keuramat Barat : Kecamatan Kuta Raja
9	Lampulo	Utara : Gampong Syiah kuala Timur : Gampong Lamdingin Selatan : Gampong Mulia Barat : Kecamatan Kuta Raja
10	Lamdingin	Utara : Kecamatan Syiah Kuala Timur : Gampong Lambaro Skep Selatan : Gampong Mulia Barat : Gampong Lampulo
11	Lambaro Skep	Utara : Gampong Syiah Kuala Timur : Gampong Syiah Kuala Selatan : Gampong Bandar Baru Barat : Kecamatan Lamdingin

Sumber: Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018

Berdasarkan keterangan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam memiliki 11 Gampong. Dari 11 Gampong tersebut Bandar Baru adalah gampong yang paling luas dibandingkan dengan gamponmg lainnya. Untuk lebih

jas, berikut adalah keterangan luas gampong, jumlah kepala rumah tangga serta jumlah penduduk gampong di Kecamatan Kuta Alam yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Luas Gampong dan Jumlah KK

No	Gampong	Luas (Ha)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Peunayong	36,1	943	3,033
2	Laksana	20,5	1,121	4,126
3	Keuramat	48,8	1,561	4,774
4	Kuta Alam	80	845	4,635
5	Beurawe	83	1,009	5,959
6	Kota Baru	69	438	1,594
7	Bandar Baru	147,25	1,424	6,895
8	Mulia	68	1,720	4,340
9	Lampulo	154,5	2,162	5,490
10	Lamdingin	84,5	747	2,707
11	Lambaro Skep	228,8	1,537	5,460
Jumlah		10,204,5	13,507	49,013

Sumber: Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018

Berdasarkan hasil tabel di atas, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Kuta Alam adalah 13,507 KK sementara jumlah penduduk sebanyak 49,013 jiwa. Sementara jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Gampong	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Peunayong	1.603	1.430	3,033
2	Laksana	2.040	2.086	4,126
3	Keuramat	2.530	2.244	4,774
4	Kuta Alam	2.421	4.635	4,635
5	Beurawe	2.703	5.959	5,959
6	Kota Baru	805	1.594	1,594
7	Bandar Baru	3.527	6.895	6,895
8	Mulia	2.376	4.340	4,340
9	Lampulo	2.896	5.490	5,490
10	Lamdingin	1.371	2.707	2,707
11	Lambaro Skep	2.807	5.460	5,460
Jumlah		25.079	23.934	49,013

Sumber: Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018

Dari tabel di atas, dapat diamati bahwa jumlah laki-laki di Kecamatan Kuta Alam sebanyak 25.079 jiwa sementara perempuan sebanyak 23.934 jiwa. Sementara itu, untuk melihat jumlah etnis tionghoa di Kuta Alam Banda Aceh dapat diamati tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk menurut Agama

No	Gampong	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	Peunayong	1.496	65	135	0	1.335	3,033
2	Laksana	3.884	71	101	0	70	4,126
3	Keuramat	4.723	41	4	0	6	4,774
4	Kuta Alam	4.559	41	30	0	5	4,635
5	Beurawe	5.919	21	0	0	19	5,959
6	Kota Baru	1.589	5	0	0	0	1,594
7	Bandar Baru	6.817	27	51	0	0	6,895
8	Mulia	4.003	49	68	0	220	4,340
9	Lampulo	5.480	10	0	0	0	5,490
10	Lamdingin	2.702	3	0	2	0	2,707
11	Lambaro Skep	5.458	0	2	0	0	5,460
Jumlah		46.630	374	391	2	1.655	49,013

Sumber: Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018

Dari tabel tersebut, jika dibandingkan penduduk Islam dan non muslim terlihat jelas bahwa di Kecamatan Kuta Alam khususnya gampong Peunayong secara umum didominasi oleh masyarakat non muslim. Untuk gampong-gampong lain secara umum didominasi oleh masyarakat Islam. Namun jika dihitung secara keseluruhan dalam Kecamatan Kuta Alam, penduduk Islam adalah yang terbanyak yaitu sebanyak 46.630 jiwa (95,13%), sementara non muslim sebanyak 2.422 jiwa (4,94%). Adapun emeluk agama paling sedikit adalah mereka yang memeluk agama hindu, sebanyak 2 orang (0,004%). Penganut agama protestan sebanyak 374 jiwa (0,76%) dan penganut agama katolik sebanyak 391 jiwa (0,79%) dan paling banyak adalah pemeluk agama hindu sebanyak 1,655 jiwa (3,37%).

4.2 Sejarah Etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Etnis Tionghoa adalah penduduk pendatang yang menetap di Banda Aceh, di mana mereka membentuk suatu kelompok yang bermaksud untuk menyamakan diri dengan penduduk asli tanpa adanya perbedaan. Etnis Tionghoa juga ikut serta berpartisipasi dalam politik di Banda Aceh, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan suara etnis Tionghoa lebih banyak memberikan suara untuk pasangan pemimpin yang mereka lebih mampu menciptakan dan mensejahterakan rakyat. Seperti halnya pada pemilu pada 2017 di Banda Aceh, suara etnis Tionghoa di daerah Peunayong lebih berpengaruh pada kemenangan pasangan Aminullah Usman- Zainal.

Kaberadaan etnis Tionghoa di Banda Aceh menjadi suatu hal yang demokratis sendiri. Hal itu dapat dilihat pada saat pemilu mereka tidak membedakan diri dengan penduduk asli warga Banda Aceh. Bahkan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu untuk berbaur dan ikut berpartisipasi terutama dalam politik. Jadi tidak ada politik identitas yang merusak demokrasi suatu bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Hubungan Aceh dan Tiongkok semakin kuat ketika Laksamana Cheng Ho melakukan kunjungan ke Kerajaan Samudera Pasai di Utara Aceh pada tahun 1415. Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam disambut baik bagaikan keluarga. Bahkan bukti kedekatan tersebut hingga saat ini masih ada bukti sebuah lonceng yang berada di Komplek Museum Aceh yang dikenal dengan Lonceng Cakradonya. Tidak hanya pada saat zaman kesultanan saja, tetapi keberadaan Peunayong tetap dipertahankan sampai pada zaman penjajahan Belanda, dimana daerah ini sengaja di desain dan dibangun dengan konsep kampung pecinan yang

sampai saat ini masih terlihat sejumlah bangunan peninggalan tempo dulu sebagai saksi bisu kemegahan Aceh pada masa lampau.

Pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami menyapu daratan Aceh, Peunayong termasuk salah satu daerah yang tersapu gelombang yang maha dahsyat tersebut. Kawasan ini lumpuh total, puing-puing bekas bangunan berserakan. Mayat bergelimpangan. Peunayong berubah menjadi kota mati. Para penghuninya memilih mengungsi ke propinsi tetangga, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Namun kini kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat. Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini.

Khusus di Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam adalah wilayah terbanyak masyarakat non muslim khususnya etnis Tionghoa yang berdomisili dan menetap di sana. Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam, merupakan salah satu pusat perdagangan di Kota Banda Aceh. Menurut catatan sejarah Aceh, nama Peunayong berasal kata "*Peunayong*," yang artinya tempat bertedeuh. Karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata "*Peumayong*" menjadi "*Peunayong*", hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah

menyebutnya “*Peunayong*”. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.¹

Peunayong adalah wilayah kota tertua di Banda Aceh. Didesain oleh Belanda sebagai *Chinezen Kamp* (tenda) atau Pecinan. Peunayong dihuni warga Cina dari Suku Khe, Tio Chiu, Kong Hu, Hokkian dan sub-etnis lainnya. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut, cukup menonjol. Karena berdagang merupakan mata pencaharian utama suku Cina, yang umumnya tumbuh di lingkungan pusat bisnis.²

Pada masa Sultan Iskandar Tsani, Ibukota kerajaan dibangun Taman Ghairah, satu taman tempat bercengkerama keluarga sultan. Di taman itu juga dibangun balai Cina, yang dibuat para pekerja Cina. Barulah pada abad ke-17, orang-orang Cina di Banda Aceh banyak berperan dalam perdagangan. Mereka, menempati rumah yang berdekatan satu sama lainnya di salah satu ujung kota di dekat laut dan daerah mereka itu saat ini dinamakan Kampung Cina.³

Vihara Dharma Bhakti yang terletak di jalan T Panglima Polem menjadi saksi keberadaan etnis Cina di Aceh. Vihara tersebut dibangun pada tahun 1937. Mulanya Vihara itu terletak di pinggir pantai Ulee Lheue. Akibat erosi, Vihara itu lalu dipindahkan ke tempat sekarang bersamaan dengan kota Banda Aceh yang dulunya juga berada di Ulee Lheue.⁴ Menurut catatan sejarah, para pedagang termasuk pedagang dari Cina, selain ada yang tinggal dan berdagang secara

¹ Banda Aceh, go.id, “*Sejarah Singkat Peunayong*”, diakses melalui situs <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, pada tanggal 16 September 2019.

² Modus Aceh, “*Sejarah Perdagangan Etnis Tionghoa di Peunayong Banda Aceh*”, dikutip dari situs <https://modusaceh.co/news/sejarah-perdagangan-etnis-tionghoa-di-peunayong-banda-aceh/index.html>, pada tanggal 12 September 2019

³ *Ibid.*

⁴ Wikipedea, “*Tionghoa Aceh*”, dikutip dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_Aceh, pada tanggal 12 September 2019

permanen di Ibukota Aceh, ada juga pedagang musiman. Pedagang itu datang dengan kapal layar, mereka menurunkan barangnya di pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan. Lokasi tempat menurunkan barang tersebut kini dikenal sebagai Peunayong.

Selain aktivitas perdagangan juga terdapat aktivitas keagamaan, ini nampak dari keberadaan sebuah wihara di antara deretan rumah dan toko modern yang berada di Jl. T Panglima Polem, Peunayong. Sepanjang pagi hari, kawasan Peunayong tak ubahnya seperti kawasan Glodok di Jakarta, atau Petaling Jaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Pedagang Cina dan warga asli Aceh berbaur dengan pengunjung pasar yang didominasi warga Cina. Suasana kedai kopi pun tampak dipenuhi generasi tua masyarakat Cina yang mengenakan kaus sederhana, menikmati kopi, menghisap rokok, sambil bercakap dalam dialek *Khe* diselingi ucapan bahasa Mandarin.

Menurut Kohl dalam Mahmud, khusus pasar di Peunayong, di sepanjang jalan tampak kekhasan bentuk fisik bangunan yang berupa deretan rumah toko atau ruko. Ruko merupakan bangunan hunian dua lantai, lantai bawah digunakan untuk berdagang, sedangkan lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal. Bentuk arsitektur ruko lazim ditemukan pada kawasan pecinan di Asia Tenggara, terutama Singapura dan Malaysia.⁵

Pada kawasan pecinan di Indonesia, ruko berarsitektur Cina dapat dikenali dari ciri: bangunan berlantai dua atau lebih dengan atap yang melengkung dan bertipe pelana (*gable roof*). Lantai biasanya terbuat dari tegel dengan berbagai ukuran dan dinding tersusun dari bata warna merah yang diples ter dengan adukan

⁵ Mahmud, M Irfan, *Pecinan, dalam Permukiman di Indonesia; Perspektif Arkeologi*, (Jakarta: Depbudpar, 2006), hlm. 235

semen, kapur dan pasir. Tampak depan ruko berisi dekorasi dari pecahan keramik, antara lain bermotif awan menggulung dan naga. Beberapa diantaranya sudah menggunakan pintu yang berbentuk lengkung *semu-circulair* yang bagian atasnya terbuat dari bata yang disusun secara vertikal mengikuti bentuk lengkungan. Bentuk lengkungan tersebut diakhiri bentuk pelipit.

Pintu dan jendela biasanya terbuat dari susunan bilah papan yang dihubungkan dengan dua engsel (*folding shutter*). Unit bangunan lain yang menjadi ciri khas kawasan pecinan adalah wihara. Ruko biasanya dirancang dalam satu blok bangunan, sedangkan wihara ditempatkan tersendiri, di ujung maupun di bagian tengah ruko secara terpisah.⁶

Pasar Peunayong merupakan salah satu pasar utama kebutuhan primer warga Banda Aceh. Secara administratif pasar ini masuk dalam Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dari Mesjid Baiturrahman berjarak sekitar 2 km ke arah utara. Secara geografis keletakannya cukup strategis karena berada tidak jauh dari tepi Krueng (sungai) Aceh di sebelah barat dan sekitar 4 kilometer ke arah utaranya berbatasan dengan laut (Selat Malaka). Dulu kawasan ini disebut Bandar Peunayong dan leluhur warga etnis Cina sudah berada di Peunayong sekitar abad 17 M.⁷ Deretan ruko lama dan sebuah wihara adalah saksi bisu dari perjalanan sejarah pasar ini yang sebagian masih kokoh berdiri setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 melanda kawasan itu.

⁶ *Ibid.*, hlm. 236

⁷ Detiknews, "Bandar Peunayong dan Leluhur Warga Etnis Cina", dikutip dari <http://jkt.detiknews.com//bandar-peunayong-dan-leluhur-wraga-etnis-cina>, pada tanggal 12 September 2019.

Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh sama dengan etnis Tionghoa lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa pada umumnya suka bekerja keras, rajin dan hemat sehingga mereka cepat berhasil dan berkembang terutama dalam bidang bisnis dan perdagangan. Etnis yang hidup dan berkembang di Aceh saat ini berkonsentrasi di Kecamatan Kuta Alam dan Baiturrahman. Etnis Tionghoa di Banda Aceh hidup berkelompok dan dalam kegiatan keseharian sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat pribumi sehingga masyarakat Tionghoa di Aceh terkesan tertutup dengan masyarakat pribumi. Namun tinggal di daerah Aceh yang notabene menerapkan syariat Islam juga tidak membuat warga etnis Tionghoa tertekan, justru etnis Tionghoa mengakui bahwa hidup di Serambi Mekkah sangat nyaman dan damai dengan saling menjaga kerukunan solid antar umat beragama.

4.3 Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Kuta Alam pada Pilkada 2017

Partisipasi politik masyarakat adalah aspek penting bagi demokrasi, sebab indikator demokrasi ditentukan oleh warga negara yang berpartisipasi dalam politik. Partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada suatu pemilihan merupakan wujud partisipasi politik yang paling dasar. Keikutsertaan atau partisipasinya merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara sampai kelompok minoritas.

Era reformasi adalah suatu arti kemerdekaan bagi etnis Tionghoa, dimana Presiden B.J Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi. Kemudian, memasuki kepemimpinan K.H Abdurahman

Wahid, etnis Tionghoa telah secara bebas untuk mengadakan kegiatan kebudayaan mereka seperti Imlek, tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.⁸

Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai pada Juni 2005 sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi.” Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Dalam hal ini yaitu rakyat terlibat dalam kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, dan partai politik. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari, mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya suatu kebijakan pemerintahan.

Partisipasi ini merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dalam suatu kelompok, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Lebih jelas, partisipasi adalah ikut berperan sertanya dalam suatu kegiatan. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut.

⁸ Agus Suharyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, [Jurnal] *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 156

Sebagaimana disebutkan oleh Kamarulzaman partisipasi artinya ikut berperan dan mengambil bagian dalam suatu kegiatan.⁹ Ramlan Surbakti memberi contoh bahwa, partisipasi politik, antara lain kegiatan mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam Pemilu dan Pilkada.¹⁰

Hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum masyarakat Tionghoa telah mendapatkan partisipasi politik dalam jumlah yang sama dan bentuk yang sama sebagaimana halnya masyarakat di Aceh secara umum, hal ini diperoleh melalui melalui pendidikan politik pada setiap sekolah mereka dalam bentuk mata pelajaran PKN. Dalam penelitian ini disebutkan oleh Harianto (54) Sekretaris Hakka,¹¹ menurutnya masyarakat Tionghoa khususnya di Banda Aceh sudah mendapatkan proses sosialisasi pendidikan politik, hal ini menurutnya sudah menjadi bagian dalam proses partisipasi politik.

“Sebagian masyarakat Tionghoa mendapatkan pendidikan politik pada saat mengikuti kegiatan sekolah, dari mata pelajaran PKn serta Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) partisipasi politik sudah mulai dirasakan dan dilaksanakan meski meski sempit ruang partisipasinya”.¹²

Menurut Beni (55), sebagian warga etnis Tionghoa pendidikan dan partisipasi politik didapat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan dan keagamaan seperti di Vihara yang sering mendapatkan suatu penyuluhan baik dari

⁹ Kamarulzaman, AKA. *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta. Absolut, 2005), hlm. 259

¹⁰ Rahman, A, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2002), hlm. 129

¹¹ Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Hakka merupakan kelompok Han terakhir yang bermigrasi ke selatan dari Tiongkok Utara secara bertahap semenjak abad ke-4 M dikarenakan bencana alam, perang dan konflik (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakka>) Atau dapat disebut Orang Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Tiongkok

¹² Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

kelurahan maupun para calon Walikota yang melakukan silaturahmi.¹³ Dapat dijelaskan bahwa, etnis Tionghoa secara umum tidak memperoleh pendidikan politik secara khusus, namun pengetahuan politik ini cenderung diperoleh secara tidak sistematis. Disebutkan lagi oleh Harianto (45), etnis Tionghoa telah banyak yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada dengan memberikan dukungan berupa hak suara baik pada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, legislatif, maupun dalam pemilihan Bupati maupun pemilihan Walikota di Banda Aceh.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diperoleh dari responden, ada faktor yang membuat masyarakat Tionghoa mempunyai sikap partisipasi yang aktif yaitu rasa simpatik masyarakat terhadap salah satu calon atau salah satu pasangan Walikota yang mereka harapkan dapat memimpin Kota Banda Aceh, misalnya yaitu untuk tahun 2017 lalu, calon Walikota Banda Aceh sebanyak 2 pasangan calon, pasangan nomor urut 1 adalah Hj. Illiza Salahuddin Djamal, SE-Farid Nyak Umar, ST, sementara pasangan nomor urut 2 Calon Walikota Banda Aceh yaitu H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM, dan Drs. H. Zainal Arifin.¹⁴ Pada 2017 lalu, masyarakat Tionghoa lebih cenderung mendukung Aminullah Usman-Zainal Arifin dibandingkan pasangan nomor urut 1 Hj. Illiza Salahuddin Djamal, SE-Farid Nyak Umar, ST.

Disebutkan lagi oleh Rudy (32) seorang pemuda etnis Peunayong, mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam Pemilukada 2017 lalu, memberi kesempatan lebih luas bagi etnis Tionghoa. Menurutnya, khususnya di Peunayong warga etnis Tionghoa selain menjadi pemilih, ada pula

¹³ Beni (55) Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

¹⁴ Beni (55) Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

yang menjadi salah satu anggota TPS, selain itu ada juga di antara mereka yang menjadi tim sukses (timses) pada salah satu pasangan calon.¹⁵

Timses pada salah satu pasangan calon ini berusaha untuk menarik dukungan atau daya tarik warga etnis Tionghoa yang belum memiliki kepastian memberikan hak pilihnya pada salah satu pasangan calon, namun jika seseorang warga etnis Tionghoa sudah diketahui betul pilihan dan dukungan pada salah satu pasangan calon, tipe pemilih seperti tidak menjadi sasaran timses, sebab mereka sudah memiliki pilihan tersendiri sehingga sulit untuk diajak bergabung. Dengan kata lain, timses pada salah satu pasangan calon bekerja untuk mencari simpatisan yang pemilihnya masih dianggap abu-abu (belum pilihan dan dukungan pada siapapun), biasanya kelompok ini biasanya cenderung kurang respon terhadap situasi dan perkembangan politik menjelang pemilihan dan kurang memiliki alasan untuk memilih salah satu pasangan calon.

Hasil wawancara dengan Sabri Harun, S.Ag keterlibatan sebagian masyarakat Tionghoa ada juga diantara mereka yang menjadi tim sukses, misalnya Ketua Yayasan Hakka, secara pasti sudah terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan Walikota atau salah satu Caleg, baik itu DPR RI, DPRA maupun DPRK Kota Banda Aceh.¹⁶ Menurut Sabri Harun, S.Ag, selama menjabat sebagai Keuchik Peunayong didapati beberapa kali masyarakat Tionghoa melakukan musyawarah terkait pasangan yang didukung oleh mereka yaitu untuk pasangan H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM –Drs. H. Zainal Arifin. Jadi, masyarakat Tionghoa ikut dan

¹⁵ Rudy (32) Pemuda Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

¹⁶ Sabri Harun, S.Ag (45) Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019

turut bermusyawarah secara mufakat dengan adanya menyumbang ide yang diusulkan kepada salah satu calon Walikota.¹⁷

Dijelaskan lagi oleh Rahmad, S.Pd, mengatakan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa tidak seperti kampanye yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh, dimana kampanyenya seperti melakukan suatu pesta, konvoi di jalan dengan berkendaraan dan lain sebagainya, namun gaya kampanye masyarakat Tionghoa dilakukan dengan duduk secara beramai-ramai atau berkumpul di suatu tempat lalu mereka mendiskusikan terhadap calon yang diusungnya dan harapan apa yang dituangkan pada salah satu pasangan Calon Walikota Banda Aceh.¹⁸

Hal ini menurut Rahmad, S.Pd masyarakat Tionghoa memang memiliki perbedaan terhadap gaya partisipasi politiknya, mungkin saja hal ini untuk menjaga agar tidak berbenturan dengan masyarakat Kota Banda Aceh yang berseberangan dukungan politiknya, dan lagi pula masyarakat Tionghoa secara/mayoritas lebih memilih bidang ekonomi dari pada bidang politik.¹⁹ Apalagi secara umum masyarakat Tionghoa ke Banda Aceh dengan latar belakang kehidupannya sebagai pedagang. Tradisi itu masih dipegang teguh secara turun temurun. Aktif di ekonomi, menggapai usaha-usaha dan bisnis menjadi pilihan masyarakat Tionghoa, dimana pun mereka menetap. - R A N I R Y

Masyarakat etnis Tionghoa menilai sosialisasi politik hanya ada pada saat *event-event* politik tertentu saja seperti pada saat menjelang Pilkada, Pilgub, dan Pemilu. Masyarakat Tionghoa juga menilai calon Walikota yang datang dan

¹⁷ Sabri Harun, S.Ag (45) Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019

¹⁸ Rahmad, S.Pd (45) Keuchik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019

¹⁹ Rahmad, S.Pd (45) Keuchik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019

bersilahturahmi hanya pada saat masa kampanye yaitu pada saat calon Walikota mencari simpatik masyarakat agar mendapat dukungan dari masyarakat. Tetapi setelah calon Walikota tersebut terpilih dan menang maka Walikota akan lupa dengan daerah yang pernah dikunjungi.

4.3.1 Tim Sukses Pasangan Calon

Dalam proses politik, misalnya pada Pemilihan Walikota Banda Aceh, warga etnis Tionghoa juga ikut terlibat sebagai tim sukses (timses), pada dua pasangan calon Walikota Banda Aceh, namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan etnis Tionghoa, disebutkan bahwa, secara umum mereka lebih banyak memberi dukungan pada pasangan urutan nomor 2 (H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin) pada 2017 lalu, hal ini dapat dilihat dari jumlah suara pasangan nomor urutan 1 sebanyak 4974 (30,5%) sementara pasangan nomor urutan 2 sebanyak 11.328 suara (69,5%) yang tersebar di 72 TPS.²⁰

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada etnis Tionghoa Aliemkhan, menyebutkan bahwa:

“Kegiatan timses itu kan pekerjaan orang-orang besar politik orang-orang bilang elit-elit politik, yang sudah memiliki kekuatan-kekuatan politik, kalau dalam bahasa kami sehari-hari sudah punya modal *lah*, punya pengalaman, punya strategi, punya teman dan saudara banyak, percaya diri juga kuat. Sejauh ini memang ada warga etnis Tionghoa yang sudah mulai memberanikan diri untuk menjadi tim sukses dalam satu calon. Namun, sekitar tahun 2000-an sepertinya tidak ada warga Tionghoa yang menjadi tim sukses”.²¹

Namun, hasil wawancara dengan salah satu warga etnis Tionghoa, Rushi, ia mengatakan bahwa untuk menjadi timses masih sulit, sebab masih ada orang lain

²⁰ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, dikutip melalui situs https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh

²¹ Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

yang lebih cocok untuk menjadi timses pada salah satu calon Walikota Banda Aceh:

Saya dan warga kami etnis Tionghoa sekitaran rumah, belum terpikirkan untuk itu dan belum ada keinginan untuk jadi timses. Kami jalani seperti biasa sajalah, memilih kemudian selesai dan menjalani hidup sehari-hari berjualan dan lain-lain, karena warga kami sebagai tukang becak ada, sopir ada, pembantu ada, pemulung juga ada. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak ada keluarga kami yang menjadi tim sukses calon Walikota Banda Aceh²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, warga etnis Tionghoa tidak pernah menjadi tim sukses, karena belum mempunyai kemampuan dan belum mempunyai pengalaman dalam bidang politik khususnya dalam bentuk partisipasi politik sebagai tim sukses. Namun hasil penelitian dengan Harianto, disebutkan bahwa, kini partisipasi politik dalam pemilihan Walikota Banda Aceh, etnis Tionghoa sudah mulai transparan dan sudah ada yang menjadi timses tentunya khusus untuk kalangan etnis Tionghoa saja, seperti timses H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin, pada 2017 lalu dan ada juga yang menjadi timses untuk Hj. Illiza Salahuddin Djamal, SE-Farid Nyak Umar, ST, bahkan ada juga yang menjadi timses untuk calon DPRK Kota Banda Aceh, seperti timses Teuku Irwan Johan misalnya. Masing-masing mereka memberi dukungan dan mengkampanyekan calon Walikota pada seluruh masyarakat etnis Tionghoa, ada dengan cara musyawarah tim ada pula dengan cara makan bersama sambil mendengar visi dan misi calon.²³

Hasil wawancara dengan salah satu responden Rudy, mengatakan bahwa, untuk tahun 2017 lalu termasuk paling banyak etnis Tionghoa yang menjadi timses

²² Aliemkhan (40), Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

²³ Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

pada pasangan calon.²⁴ Disebutkan lagi oleh Indra (25), sepanjang ini atau selama ia mendapatkan identitas berupa KTP, ia telah ikut melakukan pemilihan (mencoblos) sebanyak dua kali. Pada saat pertama ia hanya menjadi sebagai peserta pemilih, namun pada saat Pemilukada selanjutnya yaitu saat ke dua kali, ia selain menjadi peserta pemilih dalam DPT tetap namun termasuk juga salah satu tim relawan pemenangan pasangan calon Walikota Banda Aceh H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM –Drs. H. Zainal Arifin, pada Pemilukada 2017 lalu.²⁵ Selain itu, Kusmeity (45) juga membenarkan bahwa pada Pemilukada tahun 2017 lalu, keterlibatan etnis Tionghoa khususnya di Peunayong lebih banyak dibandingkan Pemilukada pada periode sebelumnya. Kali ini selain partisipasi dalam hal timses atau relawan pemenangan pada salah satu pasangan calon, etnis Tionghoa juga ada yang terlibat sebagai anggota TPS dan KPPS.²⁶

4.3.2 Keterlibatan dalam Pengurus Partai Politik

Hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa keterlibatan warga etnis Tionghoa khususnya di Kota Banda Aceh untuk ikut kepengurusan partai politik belum ada yang berpartisipasi. Hal ini dikarenakan warga etnis Tionghoa belum begitu merespon kebebasan berpolitik yang telah diberikan oleh pemerintah era reformasi dan tidak ada ajakan yang serius dari kader partai yang ada di Kota Banda Aceh untuk bergabung dalam struktur keanggotaan partai politik.²⁷

Hasil wawancara dengan Rushi, menurutnya bahwa:

²⁴ Rudy (32) Pemuda Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

²⁵ Indra (25) Pemuda Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

²⁶ Kusmeity (45) Pemuda Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

²⁷ Aliemkhan (40), Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

“Untuk keterlibatan dalam partai politik hal tersebut belum memungkinkan, hal ini karena etnis Tionghoa secara umum lebih fokus pada perdangan atau ekonomi dan bisnis. Selain itu, menurutnya, sejauh ini belum ada tawaran yang memang melibatkan etnis Tionghoa dalam partai politik. Karena keterlibatan dalam politik sama artinya kesiapan seseorang untuk meninggalkan dagangannya atau meninggalkan bisnisnya”.²⁸

Dikatakan oleh Harianto, warga etnis Tionghoa lebih cenderung aktif pada organisasi sosial sesamanya dan organisasi Hakka. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari berbagai partai yang ada di Kota Banda Aceh tidak ada satupun warga etnis Tionghoa yang bergabung dalam partai tersebut. Tidak adanya minat warga etnis Tionghoa bergabung dalam struktural partai disebabkan oleh banyak faktor seperti masih sangat dekat dengan pengalaman masa lalu, pendidikan politik, kesibukan sehari-hari sehingga sulit untuk membagi waktu antara bekerja dengan mengurus partai politik. Warga etnis Tionghoa pada umumnya aktif pada organisasi kesukuan mereka seperti “Perkumpulan Suku Hakka”.²⁹

Disebutkan oleh Kusmeity, keterlibatan etnis Tionghoa dalam pengurus salah satu partai politik memang masih rendah, hal ini dikarenakan etnis Tionghoa lebih banyak berkonsentrasi pada profesinya masing-masing yaitu dagang.³⁰ Menurut Indra, keterlibatan etnis Tionghoa dalam bidang politik (pengurus partai politik) tergolong masih rendah, sampai saat ini menurut yang diketahuinya hanya dua orang etnis Tionghoa yang terlibat dalam partai politik. Salah satunya dari kalangan pedagang yang bermosili di Peunayong atau pemilik toko perbengkelan sepeda motor yang bernama Aming (45), terlibat dalam partai Nasional Demokrat

²⁸ Rushi (49), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Ban Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

²⁹ Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

³⁰ Kusmeity (45) Pemuda Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

(Nasdem) dan seorang lagi adalah warga Gampong Laksana bernama Hendri (38) pada partai Persatuan Indonesia (Perindo).³¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diberi keterangan bahwa mengenai partisipasi politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi yang dilakukan terwujud dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang secara aktif dilakukan. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh setiap warga negara dewasa. Keikutsertaan warga negara tersebut dilakukan dengan sukarela, tidak adanya paksaan atau ancaman serta mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah, kelompok kepentingan atau partai politik. Sehingga partisipasi politik masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan tidak adanya ancaman dari siapapun.

4.3.3 Saksi dan KPPS pada Perhitungan Suara di TPS

Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) setelah pemungutan suara berakhir. Dalam perhitungan suara ini, banyak pula masyarakat etnis Tionghoa yang hadir, terutama di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Malaka Kota Banda Aceh. Masyarakat etnis Tionghoa juga menghabiskan waktu untuk mendengar dibacanya surat suara oleh KPPS dan ikut juga sorak dan tertawa saat pendukung lawan calon tertinggal suaranya.

Pada kegiatan di TPS warga etnis Tionghoa juga ada yang menjadi saksi pada salah satu calon Walikota Banda Aceh dan sudah mulai ada sejak 2012 lalu. Pada pemilihan Walikota 2017 lalu, saksi H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin pada salah TPS di Peunayong diisi oleh etnis Tionghoa dan

³¹ Indra (25) Warga Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

bukan warga Aceh yang berdomisili di situ yang menjadi saksi pasangan nomor urut 2 H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM –Drs. H. Zainal Arifin calon Walikota Banda Aceh.

Selain sebagai pemilih dan saksi, warga etnis Tionghoa juga menjadi petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di lima TPS di SMPN 5 Banda Aceh. Sama seperti pemilu atau pilkada sebelumnya, di TPS ini sekitar 70 persen pemilih adalah warga etnis Tionghoa. Jumlah pemilih mencapai 2.058 jiwa. Sehingga wajar sekali warga pribumi dan etnis Tionghoa di sini juga dilibatkan sebagai petugas. Ini semua untuk kebersamaan. Pemilih yang umumnya etnis Tionghoa tampak antusias memilih. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi jalannya prosesi perhitungan suara di TPS, para saksi juga terlibat dalam memantau semua tahapan perhitungan suara. Agar proses perhitungan suara dapat berjalan secara jujur. Selain itu keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat dilakukan dengan menjadi saksi dari salah satu pasangan calon. Sehubungan dengan keterlibatan warga etnis Tionghoa sebagai saksi pada tahapan penghitungan suara. Namun ada juga warga etnis Tionghoa yang memang tidak ada keingina dan merasa tidak mau untuk menjadi saksi pada salah satu calon. Hal ini sebagaimana salah satu responden penelitian menjawab:

“Dalam kegiatan penghitungan suara baik saya sendiri maupun warga etnis Tionghoa lainnya belum ada keinginan untuk turut serta sebagai saksi dalam hal ini. Mereka selain belum terbiasa dengan kegiatan ini juga disibukkan oleh pekerjaan atau aktivitas mereka lainnya”.³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, partisipasi politik etnis Tionghoa khususnya bagi perempuan pada tahap ini hanya sebatas menghadiri untuk memberikan hak suara, tidak sampai pada tingkat menjadi saksi dalam proses penghitungan suara. Hal ini dikarenakan warga etnis Tionghoa masih dipengaruhi oleh keadaan pembenahan kehidupan paska bencana gempa dan tsunami. Tindakan partisipasi politik ini juga didukung oleh kebiasaan sebelumnya bahwa mereka tidak pernah diikutsertakan sebagai petugas atau sebagai panitia pemilihan umum, namun proses pemilihan umum berlangsung dengan baik. Namun bagi kalangan laki-laki, partisipasi politik tidak saja pada proses timses, namun ada juga yang menjadi sebagai saksi pada salah satu TPS yang ada di Peunayong Kota Banda Aceh.

4.3.4 Ikut Serta dalam Kegiatan Kampanye

Kampanye merupakan suatu bentuk kegiatan politik, ikut serta dalam kampanye Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin, di Gampong Peunayong yaitu 90,88% suara atau sebanyak 965 suara sementara untuk pasangan Hj. Illiza Salahuddin Djamal, SE-Farid Nyak Umar, ST, adalah 88 suara (9,11%).

Kemenangan pasangan H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM – Drs. H. Zainal Arifin, di Peunayong tentu tidak terlepas dari keterlibatan etnis Tionghoa terhadap partisipasinya pada proses-proses kampanye politik pada pemilihan

³² Ayen (57), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Ban Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

Walikota Banda Aceh.³³ Disebutkan oleh Beni, bahwa kemenangan salah satu pasangan calon Walikota khususnya di Peunayong tidak pernah dengan jumlah persentase terbanyak seperti kali ini, biasa jumlah suara terhadap masing-masing calon meski tidak sama jumlahnya namun tidak berbeda jauh seperti hasil perolehan suara kali ini.³⁴

Berdasarkan proses kemenangan dan perolehan suara dimaksud Sabri Harun, menjelaskan bahwa:

“Warga masyarakat etnis Tionghoa Kota Banda Aceh merupakan masyarakat yang sudah mulai tumbuh motivasi dalam kegiatan politik, boleh kita katakan mereka sudah mulai aktif sama dengan warga lainnya di kelurahan Peunayong. Hal ini nampak ketika waktu KIP memberikan sosialisasi cara pencoblosan yang benar, suasananya sudah sangat berbeda dengan sosialisasi Pemilukada tahun 2012 lalu, warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh yang hadir dalam mengikuti sosialisasi cukup ramai. Warga etnis Tionghoa juga sudah mulai aktif dalam mengikuti kampanye. Pihak KIP telah memberikan jadwal kampanye kepada setiap partai, terlihat di lapangan dalam Kota Banda Aceh bahwa sudah ada sebagian warga masyarakat etnis Tionghoa yang hadir, mereka ingin melihat figur calon Walikota, dan visi misinya”.³⁵

Hasil wawancara di atas, memberi informasi bahwa warga atau masyarakat etnis Tionghoa merupakan suatu kelompok yang tergolong sudah lama menetap dan beradaptasi dengan masyarakat Aceh sekitarnya, terutama yang ada di Peunayong, meski demikian partisipasi masyarakat dalam bidang politik sejak dulu tergolong masih rendah, hanya beberapa kali ini saja atau dalam dua periode Pemilukada ini keterlibatan etnis Tionghoa sudah mulai bermuculan ke publik

³³ Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

³⁴ Beni (55) Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

³⁵ Sabri Harun, S.Ag (45) Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019

terhadap partisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif.

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, kondisi yang sama juga dikemukakan salah seorang responden bahwa:

“Pada Pemilukada Walikota Kota Banda Aceh tahun 2017 yang lalu nampaknya ada perasaan, dan keinginan yang baru dari warga kami di sini, khususnya tentang kampanye. Pada saat itu saya dan beberapa teman sangat berkeinginan untuk mengikuti kampanye, keinginan ini didukung oleh kesempatan. Oleh karena itu kesempatan itu kami gunakan dengan baik untuk ikut kampanye, kegiatan ini dengan mudah dapat kami ikuti karena sebelumnya kami sudah menerima jadwal kampanye masing-masing calon Walikota yang diberikan oleh petugas Pemilukada. Tetapi lebih banyak juga warga kami yang tidak mengikuti kampanye, sama juga dengan warga-warga kita yang lain, kalau datang semua bisa penuh lapangan peunayong ini. Tetapi kehadiran kami masih tertuju kepada calon Walikota tertentu, jadi belum merata walaupun tempat kampanye di lapangan yang sama”.³⁶

Disebutkan oleh Rudy, ikut serta etnis Tionghoa dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilukada juga sudah banyak yang mengikutinya. Biasanya kampanye ini dilakukan tidak di luar Gampong Peunayong, biasanya di rumah warga etnis Tionghoa itu sendiri. Rumah tersebut adalah rumah timses atau rumah tim relawan.³⁷ Keikutsertaan warga Etnis Tionghoa dalam kegiatan kampanye menjelang Pemilukada merupakan suatu fenomena kegiatan politik baru bagi warga mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada saat kampanye dilaksanakan di lapangan Peunayong, terlihat ada sebagian warga etnis Tionghoa yang mengikuti kampanye. Kehadiran mereka belum merata untuk semua calon Walikota, tetapi mereka masih mengarah kepada figur calon Walikota tertentu. Pada umumnya ramai tidak ramai masyarakat yang hadir dalam mengikuti kampanye didasarkan

³⁶ Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

³⁷ Rudy (32) Pemuda Etnis Tionghoa berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 13 November 2019

pada tingkat kekuatan para calon Walikota menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti kampanye.

4.3.5 Pemberian Suara sebagai Hak Pilih Warga Negara

Tingkat bentuk partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam Pemilu pada Tanggal 9 April 2012 merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan dengan Pemilu pada Tahun 2012 yang lalu, seperti yang dikemukakan oleh Keuchik Gampong Peunayong bahwa:

“Pemilu pada Tahun 2017 yang diikuti oleh warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh, khususnya di Gampong Peunayong kami perhitungkan mengalami peningkatan dibandingkan pemilu pada Tahun 2012 lalu, tingkat partisipasi warga etnis Tionghoa hanya mencapai 24%, dari daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banda Aceh”.³⁸

Peningkatan partisipasi politik warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam Pemilu merupakan salah satu hasil dari peran KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik warga etnis Tionghoa dalam Pemilu pada tahun 2017 merupakan pencapaian partisipasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu pada periode tahun-tahun lalu. Pada Pemilu pada tahun 2017 terjadi peningkatan partisipasi politik warga etnis Tionghoa sebesar 73%, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran politik warga etnis Tionghoa untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu.

Melihat partisipasi politik warga etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh khususnya di Peunayong sebagai sampel yang dipilih karena didominasi oleh warga etnis Tionghoa dapat di jelaskan bahwa, tingkat partisipasi politik dalam bentuk pemilihan suara pada 2017 lalu dapat dilihat bahwa penduduk Gampong

³⁸ Sabri Harun, S.Ag (45) Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019

Peunayong pada akhir 2018 lalu sebanyak 3.033 jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 2.041 yang dinyatakan sebagai pemilih oleh KIP Banda Aceh dan sebanyak 975 jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah itu sebanyak 47,83% tingkat partisipasi warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh. Kemudian sebanyak 877 suara yang dinyatakan sah oleh KIP Kota Banda Aceh atau sebanyak 89,94% suara sah yang ikut serta dalam pencoblosan, sisanya sebanyak 10,06% adalah suara yang dinyatakan tidak sah.³⁹

Jika dihitung secara umum se-Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebanyak 29.244 jiwa yang dinyatakan sebagai pemilih oleh KIP Kota Banda Aceh, laki-laki sebanyak 14.692, perempuan 14.892 jiwa. Pengguna hak pilih kriteria laki-laki sebanyak 7.692 jiwa, perempuan 8.284 jiwa atau totalnya adalah sebanyak 16.744 yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada tahun 2017 lalu. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah laki-laki sebanyak 52,42%, perempuan 55,63% dan secara umum tingkat yang dihitung tingkat Kecamatan Kuta Alam partisipasinya sebanyak 57,32%.⁴⁰

Tingkat ketidakhadiran di TPS dalam Pemilu pada tahun 2017 secara umum masih sangat banyak melebihi 25%. Gambaran semacam ini seolah warga etnis Tionghoa atau masyarakat Kuta Alam secara umum mereka semuanya banyak yang apatis.⁴¹ Seolah pemilihan Walikota di Banda Aceh hanya dilakukan oleh

³⁹ Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

⁴⁰ Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

⁴¹ Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

sebagian masyarakat saja tanpa mempertimbangkan hak memilih warga negara terhadap salah satu calon yang dianggap layak bagi pribadi masyarakat.

Ada banyak alasan yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. *Pertama*, sebagian dari mereka sedang bekerja di luar kota, *kedua*, manula yang sudah tidak mungkin datang ke TPS masih masuk ke daftar TPS. *Ketiga*, masyarakat benar-benar apatis. *Keempat*, ada kesibukan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan.⁴² Sehubungan dengan tahapan pemungutan suara dengan warga etnis Tionghoa, Rushi mengatakan:

“Pemilukada pada waktu itu nampaknya sangat menarik perhatian warga kami di sini, cukup tinggi motivasi warga dalam tahap ini khususnya dalam memberikan suaranya dalam Pemilukada ini. Saya juga menyaksikan sendiri di TPS 4, tempat saya memilih pada umumnya warga etnis Tionghoa yang ikut memilih. Saya sendiri datang ke TPS bersama keluarga dan teman-teman secara sukarela untuk menggunakan hak suara sebagai rasa tanggung jawab warga negara untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Calon Walikota yang saya pilih hanya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan sesuai dengan visi dan misinya. Selain dari itu saya juga melihat pengalaman atau hasil kerja para calon Walikota selama ini yang telah diberikan untuk pembangunan Kota Banda Aceh. Itu saja, politik uang, ancaman, pengerahan untuk kepentingan tertentu tidak ada di sini. Gampong kita sangat kondusif”.⁴³

Pada tahap pemungutan suara ini, warga etnis Tionghoa yang berada di Gampong Peunayong sebagian besar mereka ikut memberikan suaranya pada pemilihan Walikota Kota Banda Aceh. Mereka menggunakan hak suara dengan memilih calon Walikota berdasarkan visi, misi, program pembangunan, pengalaman, dan hasil kerja nyata yang telah berhasil dibuktikan selama ini untuk kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh. Hal itu dapat dilihat dari hasil

⁴² Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

⁴³ Rushi (49), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Banda Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019 dan Ayen (57), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Banda Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

wawancara yang relevan dengan data tabel di atas, yaitu terjadi peningkatan partisipasi warga etnis Tionghoa yang datang ke TPS di lingkungan mereka masing-masing untuk menggunakan hak suaranya.

Seperti yang disampaikan oleh KIP Banda Aceh, sebanyak 161.017 warga Banda Aceh memberikan hak suaranya di 436 TPS yang tersebar di 90 desa se-Kota Banda Aceh. Sedikitnya ada ribuan warga etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh memilih Walikota nomor urut (2), H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM –Drs. H. Zainal Arifin. Hal itu diketahui setelah hasil pleno Pilkada Banda Aceh, pada 15 Februari 2017 tingkat Kecamatan Kuta Alam, pada hari Jum'at 17 Februari 2017. Faisal, SH mengatakan, calon Walikota nomor urut (2), unggul, sedangkan calon Walikota nomor urut (1) jauh tertinggal.

Mengacu dari hasil pleno tingkat kecamatan itu, warga etnis Tionghoa yang sudah lama berdomisili di Kota Banda Aceh umumnya tinggal di Gampong Laksana, Gampong Keuramat, Gampong Mulia dan Peunayong. Empat gampong itu suara untuk pasangan nomor urut (1) kandas dan dinyatakan kalah telak di Peunayong. Sementara itu warga etnis Tionghoa yang tinggal di empat gampong itu memberikan 4.296 suara sah kepada pasangan nomor urut (2) sebagai Walikota Banda Aceh periode 2017 –2022.

4.4 Kepentingan Politik Identitas Etnis Tionghoa pada Pemilukada 2017

Seperti yang telah disebutkan dahulu, politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Pemaknaan bahwa politik identitas

sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan hal ini dapat dilihat dari praktik politik sehari-hari, dimana identitas adalah sebuah dinamika pertumbuhan dari politik identitas.⁴⁴

Politik identitas ini sangat berimplikasi pada kecenderungan masyarakat, untuk mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara, menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan serta kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya oleh kelompok itu, misalnya kelompok etnis tionghoa di Kuta Alam Banda Aceh. Harus diingat bahwa pengaruh identitas dalam politik terwujud karena kepentingan dari suatu kelompok etnik, agama, bahasa dan lain sebagainya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, warga etnis Tionghoa Kuta Alam Kota Banda Aceh pada pilkada tahun 2012 tidak ramai membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa politik yang terkait. Hal ini dapat saja dikarenakan karena keinginan untuk terlibat dalam politik masih rendah apalagi rata-rata etnis Tionghoa adalah lebih memilih untuk memfokus pada bisnis atau berdagang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Aliemkhan bahwa:

“Saya sangat jarang mengikuti perkembangan pemilukada di media massa, karena tidak menjadi perhatian saya, mungkin belum terbiasa, hanya saya mengingat hari dan tanggal pelaksanaan pilkada untuk penyoblosan memberi suara di TPS. Saya juga sangat jarang membicarakan dan mendiskusikan mengenai pemilukada dengan sesama warga kami di sini, mungkin hal seperti itu karena tidak biasa dilakukan baik di dalam keluarga maupun di keluarga kami disini. Masing warga kami hanya memfokuskan

⁴⁴ Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, hlm. 22

pada kegiatan rutinitas, ya jualan, jasa, membuat makanan dan minuman untuk dijual, itu saja”.⁴⁵

Disebutkan juga oleh Ayen, warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pilkada tahun 2012 tidak ramai membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa politik yang terkait.⁴⁶ Komunikasi politik tidak ada yang tergolong lazim bagi warga etnis Tionghoa sejak beberapa tahun terakhir, atau sejak 2012, namun kondisi ini tentu tidak sama hal dengan keadaan 2017 ini, bisa jadi hal ini dipengaruhi oleh figur atau tokoh yang mencalonkan diri. Di mana H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM, dikenal sebagai figur yang berjiwa ekonomi serta berjiwa bisnis sebab pengalamannya yang lalu pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank BPD Aceh kini yang sudah berganti nama menjadi Bank Aceh Syariah. Hal ini bisa saja warga etnis Tionghoa melihat keberhasilan saat ia memimpin Bank daerah yang besar itu.

Oleh karena figur atau ketokohan H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM, banyak etnis Tionghoa berperan dalam politik untuk pemenangan calon Walikota Banda Aceh. Hal ini mereka lakukan karena ada semacam kendaraan politik yang lebih dekat dengan mereka. Apalagi ada partai koalisi dengan H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM –Drs. H. Zainal Arifin, dapat menjadi bagian terpenting bagi organisasi etnis Tionghoa dalam mengambil peran dalam proses-proses kampanye politik pemilukada di Banda Aceh kala itu.

Sejalan dengan Ayen, Ruhsi juga memberikan pandangan yang sama, bahwa:

⁴⁵ Aliemkhan (40), Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

⁴⁶ Ayen (57), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Ban Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

“Saya sangat jarang membicarakan calon Walikota dan wakil Walikota bersama teman-teman. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang calon kepala daerah tersebut, karena mereka tersebut pasti sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang diperlukan oleh pemerintah, pasti sudah baik-baik semuanya. Saya dan teman-teman warga di sini setuju-setuju saja calon yang terpilih dalam pilkada itu. Selain dari itu saya belum merasa terbiasa dengan ngobrol politik, mungkin saya dan teman-teman yang lain sibuk dengan pekerjaan”.

Dalam hal ini pengaruh kepentingan politik identitas pada masyarakat Tionghoa, dapat dikemukakan faktor-faktor pendorong partisipasi politik yang mempengaruhi partisipasi politik warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2017 adalah sangat tergantung dari konsep apa yang diperjuangkan oleh warga etnis Tionghoa. Sebab, daya tarik simpatikan pada salah satu pasangan calon sebenarnya tidak mudah, apalagi masing-masing pasangan calon memiliki kekuatan dan gaya kampanye tersendiri atau masing-masing pasangan calon memiliki kekuatan yang seimbang sesamanya.

4.4.1 Kesadaran Politik

Berdasarkan kesadaran politik yang berasal dari dalam diri masyarakat, khususnya warga etnis Tionghoa dalam Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2017, telah mendorong warga etnis Tionghoa untuk berpartisipasi politik, dalam hal ini adalah dalam bentuk pemberian suara dalam pemilukada di daerahnya, serta keterlibatan sebagai tim pemenang salah satu pasangan calon. Mereka menganggap perlu untuk memberikan suaranya karena suara mereka dalam Pemilukada di daerahnya akan menentukan kehidupan mereka dalam program pembangunan yang akan datang di daerah mereka sendiri yaitu Kota Banda Aceh. Warga etnis Tionghoa juga menyadari bahwa peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan semakin diakui dalam segala sektor. Warga etnis Tionghoa menyatakan

bahwa peran pemerintah pada masa depan akan mempengaruhi taraf hidup mereka, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Harianto, bahwa:

“Kami dari warga etnis Tionghoa Penayong Kota Banda Aceh untuk kali ini merasa lebih bersemangat dalam menyikapi pilkada, paling tidak untuk memberi suara, walaupun yang lain-lainnya sudah disamakan dengan masyarakat umum. Tapi kami masih semacam wacana, mungkin masih perlu sosialisasi. Kami ingin ikut berpartisipasi khususnya atau hanya memberi suara kami, untuk mendapatkan pemimpin atau kepala daerah kami yang akan datang yang benar benar memperhatikan kebutuhan penduduk kota ini, memikirkan nasib rakyatnya dan kesejahteraan rakyatnya, yang jelasnya dapat memberikan suatu perubahan”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, warga etnis Tionghoa ikut serta dalam kegiatan politik karena mereka ingin mendapatkan pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah lebih baik sesuai dengan permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh, sehingga kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh ke depan akan lebih baik dari sebelumnya.

4.4.2 Faktor Lingkungan Masyarakat Setempat

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh, walaupun mereka jarang membicarakan masalah politik sesama warga, tetapi ketika pada hari pemberian suara minat para warga bertambah meningkat untuk datang ke TPS karena merasa tidak nyaman, dan tidak enak dengan tetangga yang pada umumnya menyambut Pemilukada tahun 2017 dengan penuh kegembiraan dan harapan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rushi dalam bahwa kedatangan masyarakat ke TPS untuk menggunakan hak suara karena tidak enak dengan

⁴⁷ Beni (55) Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

tetangga, walaupun saya tidak tahu sebaiknya siapa yang akan saya pilih.⁴⁸ Walaupun demikian antusias masyarakat pada saat pemungutan suara cukup tinggi. Selain dari itu keadaan lingkungan sangat kondusif sehingga dapat mendorong warga untuk berpartisipasi secara nyaman dan sukarela berdasarkan pilihan masing-masing warga.

4.4.3 Dukungan Politik

Perasaan belum mampu merupakan suatu unsur yang bisa menghambat seseorang berpartisipasi dalam bidang politik, sehingga sebagian warga Etnis Tionghoa berpendapat bahwa yang berhak untuk menekuni kegiatan politik secara aktif adalah orang-orang yang mempunyai bakat dalam bidang politik, yang mempunyai kekuatan ekonomi biaya politik, berpendidikan, dan orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik. Unsur-unsur tersebut pada umumnya belum dimiliki oleh warga etnis Tionghoa, oleh karena itu hingga saat ini belum ada muncul sebagai pelaku-pelaku politik aktif di Kota Banda Aceh.

Hal yang sama dikemukakan oleh responden yang lain, bahwa merasa malu untuk ikut dalam kepanitiaan Pemilukada karena belum terbiasa berbicara di depan umum dan harus berhadapan dengan orang banyak. Responden lain juga mengemukakan pandangan yang sama bahwa untuk menjadi sebagai panitia Pemilukada belum berani dan masih ragu-ragu karena belum pernah terlibat dalam kepanitiaan pemilu. Oleh karena itu panitia pemilu sebaiknya dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman.

⁴⁸ Rushi (49), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Ban Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

Perasaan belum mampu merupakan suatu unsur yang bisa menghambat seseorang berpartisipasi dalam bidang politik, sehingga sebagian warga etnis Tionghoa berpendapat bahwa yang berhak untuk menekuni kegiatan politik secara aktif adalah orang-orang yang mempunyai bakat dalam bidang politik, yang mempunyai kekuatan ekonomi biaya politik, berpendidikan, dan orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik. Unsur-unsur tersebut pada umumnya belum dimiliki oleh warga etnis Tionghoa, oleh karena itu hingga saat ini belum ada muncul sebagai pelaku-pelaku politik aktif di Kota Banda Aceh selain kalangan yang terlibat aktif hanya saat pelaksanaan musim kampanye saja.⁴⁹

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, bahwa beberapa orang warga Tionghoa di kawasan perdagangan Peunayong mengaku masih tidak memahami sepenuhnya dengan sosialisasi Pilkada Aceh 2017 yang diberikan oleh KIP kota Banda Aceh dan kurang mengerti dengan cara penggunaan hak suara mereka, sebagian lainnya mengaku tidak mengenal lebih jauh terhadap calon-calon kepala daerah yang mempunyai integritas dan kredibilitas tinggi yang akan bersaing pada Pilkada Aceh 2017, ada yang mengaku masih kurang tertarik atau kurang antusias terhadap Pilkada Aceh 2017 dan sudah pernah golongan putih (golput) pada pilkada periode-periode sebelumnya. Sedangkan beberapa dari orang Tionghoa tersebut mengaku sudah sangat paham dengan Pilkada Aceh 2017 maupun situasi perpolitikan di Aceh khususnya Banda Aceh melalui media dan sering berbaur dengan warga Aceh yang berkecimpung di dalamnya, beberapa orang diantaranya sudah pernah menjadi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di pilkada periode sebelumnya.

⁴⁹ Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

Hal yang sama dikemukakan oleh responden yang lain, bahwa merasa malu untuk ikut dalam kepanitiaan Pemilukada karena belum terbiasa berbicara di depan umum dan harus berhadapan dengan orang banyak.⁵⁰ Responden lain juga mengemukakan pandangan yang sama bahwa untuk menjadi sebagai panitia Pemilukada belum berani dan masih ragu-ragu karena belum pernah terlibat dalam kepanitiaan pemilu. Oleh karena itu panitia pemilu sebaiknya dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari temuan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kurangnya partisipasi warga etnis Tionghoa pada pemilihan kepala daerah 2017, antara lain yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi KIP Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini KIP Kota Banda Aceh memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesadaran atau partisipasi politik masyarakat pada setiap pemilihan umum, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada setiap kalangan masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun marginal, minoritas dan difabel karena pada dasarnya semua adalah bagian dari warga negara. Namun dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dinilai kurang berjalan maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin tentunya menjadi masalah besar bagi perpolitikan suatu negara atau daerah dalam menentukan masa depannya. Negara demokrasi mengharuskan setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam menentukan arah bangsa, keikutsertaan masyarakat sangatlah berpengaruh besar. Namun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

⁵⁰ Beni (55) Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

dalam pemilihan umum tentunya harus ada himbauan dalam bentuk sosialisasi yang mestinya diberikan oleh pihak pelaksana pemilihan umum tersebut yang mana KPU atau KIP khususnya di Aceh merupakan pelaksananya, mengingat tidak semua masyarakat paham akan segala proses pelaksanaan pemilihan umum.

2. Kurangnya kesadaran warga etnis Tionghoa

Pada kasus ini warga etnis Tionghoa lebih mengedepankan kepentingan bisnisnya daripada harus ikut berpartisipasi pada perpolitikan. Jika pun ikut partisipasi mereka hanya sekedar untuk menggunakan hak suaranya di TPS namun tidak mengikuti tentang perkembangan politik secara menyeluruh sebelum dan setelah pemilihan umum. Kemudian faktor perbedaan pendapat antara calon kepala daerah dengan etnis Tionghoa juga membuat rendahnya kesadaran politik mereka. Bagi etnis Tionghoa siapapun kepala daerahnya yang penting mereka dapat hidup aman, rukun, tenteram tidak ada tekanan-tekanan dari pihak luar dan tidak terganggu perekonomian bisnis yang mereka jalankan.

3. Kurangnya kepercayaan warga etnis tionghoa terhadap calon-calon pemimpin

Kurangnya kepercayaan warga etnis Tionghoa terhadap calon pemimpin dapat disebabkan oleh beberapa alasan, misalnya kekecewaan dari etnis Tionghoa terhadap pemimpin-pemimpin yang sebelumnya menjabat. Kekecewaan yang berkepanjangan tersebut membuat mereka tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah. Warga etnis Tionghoa juga beranggapan bahwa calon-calon pemimpin tidak sesuai

dengan keinginan masyarakat yang dapat membawa perubahan besar pada etnis Tionghoa dan pembangunan untuk rakyat Aceh pada umumnya. Setiap kalangan masyarakat tentunya berkeinginan untuk dipimpin oleh sosok pemimpin yang memiliki tingkat kualitas dan kredibilitas yang tinggi, yang mana dengan hal tersebut akan membawa pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan suatu daerah. Begitu pula dengan calon-calon yang ingin maju sebagai pemimpin harus mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat agar terpilih pada saat pemilihan umum. Dengan begitu para calon-calon tersebut harus dapat mengambil hati masyarakat yakni dengan memberi sebuah kepercayaan dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan semua kalangan masyarakat yang ada pada suatu daerah serta tidak akan mengkhianati kepercayaan masyarakat tersebut yang dikarenakan oleh kepentingnya sendiri maupun kelompoknya.

4. Adanya warga etnis Tionghoa yang terdaftar di DPT berada di luar wilayah pemilihan

Hal ini tentunya menjadi satu masalah yang tidak seharusnya terjadi pada saat pemilihan umum. KIP Kota Banda Aceh perlu mengkaji ulang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah agar tidak terjadinya praktik kecurangan yang fiktif dan mengurangi kerugian terhadap masyarakat yang tidak dapat memilih. Kemudian warga etnis Tionghoa yang berada di luar daerah juga diharapkan timbul rasa kesadaran untuk ikut serta pada saat pemilihan umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dijelaskan pada bagian dahulu, dalam bagian ini akan disimpulkan hal-hal yang dianggap penting berkenaan dengan judul penelitian ini *Pengaruh Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pilkada 2017 Terhadap Kemenangan Aminullah Usman- Zainal Arifin; Studi Kasus Pada Etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam*, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun partisipasi politik etnis Tionghoa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Pemilu pada tahun 2017 lalu sudah semakin meningkat dibandingkan Pemilu pada tahun 2012 lalu. Etnis Tionghoa secara umum mulai terbuka terhadap politik dan terbuka pula akses politiknya untuk ikut serta ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Sementara itu, para konstituan semakin memperhitungkan keberadaan etnis Tionghoa di Banda Aceh khususnya Kecamatan Kuta Alam, sebab selain memiliki lumbung suara yang banyak jalur untuk meraup suara juga tidak sulit, apalagi wtnis Tionghoa kini telah memiliki banyak organisasi sosial sesamanya. Sementara itu, partisipasi politik etnis Tionghoa ini selain memberi dukungan suara (pemberian hak suara), juga ada yang menjadi tim sukses bahkan menjadi saksi pada salah satu pasangan calon Walikota Banda Aceh. Hal ini berbeda seperti periode sebelumnya dimana partisipasi politik etnis Tionghoa hanya pada batas pemberian hak suara pada hari pencoblosan.

2. Kepentingan politik identitas etnis Tionghoa pada Pemilu 2017 terhadap pemilihan Walikota Banda Aceh, didorong oleh kesadaran politik dan lingkungan atau keadaan masyarakat wilayah domisili, namun ada juga yang membuat mereka tidak terpengaruh sama sekali dikarenakan kesibukan kegiatan sehari-hari dan tidak menerima undangan. Oleh karena itu, kesadaran politik dan rasa ingin tahu semakin membaik dari waktu ke waktu.

5.2 Saran

1. Sebaiknya lembaga penyelenggaraan pemilu bekerjasama yang berkesinambungan dengan lembaga pendidikan, Ormas untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat pada umumnya dan kepada warga etnis Tionghoa khususnya, sehingga dapat merangsang keinginan politik warga etnis Tionghoa untuk berpartisipasi lebih luas dalam dunia politik.
2. Sebaiknya warga etnis Tionghoa dapat membuka diri untuk menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, serta menghilangkan perasaan belum mampu atau belum pantas dalam kegiatan politik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, Ubed S, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*, Magelang : Indonesiaterra, 2002
- Agnes Heller, dikutip Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis*, Magelang : Indonesia Tera, 2002
- Agus Maladi Irianto, *Integrasi Nasional sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indoensia [Jurnal] Budaya Nasional, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2014*
- Agus Suharyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, [Jurnal] Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2014,*
- Amita Darmawan Putri dan Lukmawati. Makna Sabar Bagi Terapis; Studi Fenomenologis di Yayasan Bina Autis Mandiri Palembang, [Jurnal] PSIKIS, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Psikologi Islami Vol. 1 No. 1 Juni 2015
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Kuta Alam dalam Angka 2018*, Banda Aceh: BPS, 2018
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Burhan Bungin, *Metode dan Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2006
- Cangara Hafid, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2004
- Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Corey, Gerald, *Teori Dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Effendy dan Onong Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Ety Gustin Merdeka Waty, seorang mahasiswa program studi ilmu politik pemerintahan, “*Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar*”. (Fakultas ISIP Univesitas Hasanuddin Makassar, 2016

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2012
- Imaduddin Nasution, *Demokrasi dan Politik*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013
- Ignas Kleden dalam makalah berjudul “Identitas dan Integrasi” dalam Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi, 19-22 Oktober 2003.
- Kamarulzaman, AKA. *Kamus Ilmiah Serapan*, Yogyakarta. Absolut, 2005
- Khorion Nida, Fatma Laili, *Komunikasi Bagi Naka Bekerbutuhan Khusus*. [Jurnal] AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2013
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 2000
- Krisyantoro, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta:Kencana, 2006
- Lukmantoro, Triyono. *Kematian Politik Ruang*, Jakarta: Kompas, 2008
- Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Mahmud, M Irfan, *Pecinan, dalam Permukiman di Indonesia; Perspektif Arkeologi*, Jakarta: Depbudpar, 2006
- Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Indentitas di Ranah Lokal*, [Jurnal] Studi Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang, Volume 1, Nomor 1 Februari 2012
- Nasution, *Metode Reseach*. Bumi Aksara: Jakarta, 2003
- Nasution, M. Imaduddin, *Partispasi Politik Umat Kristen Indonesia*, Studi Kasus Partai Damai Sejahtera, (Jakarta: Verbum, 201
- Nudraha, Taliziduhu, *Reseach Teori Metodologi Adm*. Jakarta: Bina Aksara, 2005

Norberta, Dian Prima, *Pengembangan Inventori Keterampilan Komunikasi Interpersonal Berbasis WEB Bagi Siswa SMA*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan UM, 2011

Ovi Amalia Sari, Zulfan, *Jurnal Aceh Terkini. Com*, 2017, Vol. 2 di akses tanggal 21 Agustus 2018

Peraturan Pemilu, *Artikel Bertopik Politik ini adalah Sebuah Rintisan*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019

Rahman, A, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC, 2002

Rizky Hani S.P,dalam *Jurnal Paradigma*. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013

Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001

Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2010

Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran Pendidikan Isam Ahmad Syafii Ma'arif*, Jakarta: Gramedia, 2010

Sugiyono, *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2013

Usman Rani, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor, 2009

Victor Purcell, *The Chinese In Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981

Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewarganegaraan, Arah Baru Politik, Keragaman di Indonesia*, Bandung – Yogyakarta: Mizan Pustaka, 2011

Sumber Online

Aceh Terkini. Com. *Pilkada 2017*, kpu. go.id, di akses tanggal 21 Agustus 2018

Atjehpost. Com. *Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2014*, di akses pada tanggal 21 Agustus, 2018

Banda Aceh, go.id, “*Sejarah Singkat Peunayong*”, diakses melalui situs <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, pada tanggal 16 September 2019.

Detiknews, “Bandar Peunayong dan Leluhur Warga Etnis Cina”, dikutip dari <http://jkt.detiknews.com//bandar-peunayong-dan-leluhur-wraga-etnis-cina>, pada tanggal 12 September 2019.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, dikutip melalui situs https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh, diakses pada tanggal 12 Februari 2019

Kompasiana, “*Virus Teror dan Integrasi Politik*”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/59352e6bf47e61f25105f2fd/virus-teror-dan-integrasi-politik?page=all>, pada tanggal 12 September 2019, pukul 10:23 WIB

Modus Aceh, “*Sejarah Perdagangan Etnis Tionghoa di Peunayong Banda Aceh*”, dikutip dari situs <https://modusaceh.co/news/sejarah-perdagangan-etnis-tionghoa-di-peunayong-banda-aceh/index.html>, pada tanggal 12 September 2019

<http://nursing46.blogspot.co.id/2010/11/komunikasi-interpersonal.html?m=1>. Diakses tanggal 7 Januari 2016.

<http://www.solider.artikel.or.id>. Diakses tanggal 7 Januari 2016.

Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 2018 https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/kota_banda_aceh/kuta_alam

Wikipdeia, “*Tionghoa Aceh*”, dikutip dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_Aceh, pada tanggal 12 September 2019

Responden Penelitian

Rushi (49), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Ban Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

Aliemkhan (40), Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

Harianto (54), Sekretaris Hakka, Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019

Beni (55) Berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019

Sabri Harun, S.Ag (45) Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019

Ayen (57), Warga etnis Tionghoa di Peunayong Kota Ban Aceh, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2019

Rahmad, S.Pd (45) Keuchik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019

Sabri Harun, S.Ag (45) Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019



FOTO-FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan Camat Kuta Alam



Wawancara Etnis Tionghoa di Peunayong



Wawancara dengan Keuchik Peunayong



Wawancara dengan Sekretaris HAKKA Tionghoa



Wawancara dengan etnis Tionghoa, Beni



Wawancara dengan Alimkhan warga Peunayong



Wawancara dengan etnis Tionghoa Rudy,
Kusmeity dan Liling



Wawancara dengan Indra warga Peunayong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Joni Syahputra
2. Tempat / Tgl. Lahir : Singkohor, 07 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 150801072
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Singkohor, Aceh Singkil
 - a. Kecamatan : Singkohor,
 - b. Kabupaten : Aceh Singkil
 - c. Propinsi : Aceh
8. No. Hp : 0857-6299-4225
9. Nama ayah : Abdul Mulut
10. Nama Ibu : Inang
11. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Alamat Orang Tua : Singkohor Aceh Singkil
13. SD : SD N.1 Singkohor lulus thn 2009,
14. SMP : SMP Negeri 1 Kuta Baharu, lulus tahun 2012
15. SMA : SMA Negeri 1 Kuta Baharu lulus tahun 2015
16. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, lulus Tahun 2015

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Peneliti,

(Joni Syahputra)